



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL (STUDI KASUS: PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA KOTA SOLOK)

SKRIPSI



**RAHMA YENITA
06951009**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : **RAHMA YENITA**
No. BP : 06 951 009
Jenjang Pendidikan : S 1 (Strata Satu)
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : **Analisis Pengembangan Usaha Sektor Informal
(Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya
Kota Solok)**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang diadakan pada tanggal 23 Desember 2010 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Padang, Januari 2011
Pembimbing



Fery Andrianus, SE, M.Si
NIP.132 230 524

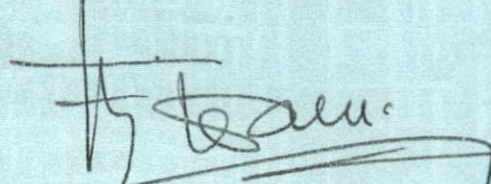
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Prof.Dr.H.Syafruddin Karimi,SE,MA
NIP.195410091980121001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing
NIP.130 812 952

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah.....

Hanya dengan kehendakmu Allah SWT

Semua ini dapat terwujud...

Puji syukur kupanjatkan kehadiran-mu ya Allah

Atas segala anugrah yang telah engkau berikan

Sehingga pada hari ini aku telah mampu memenuhi

Sebuah harapan

Dari orang-orang yang kucintai dan mencintaiku

Ya Allah.....

Secercah harapan telah kugenggam

Sepenggal asa telah kuraih

Terima kasih Tuhan

Kau beri aku kesempatan untuk

Membahagiakan orang-orang di sekelilingku...

Kupersembahkan karya ini sebagai kebulatan tekadku

Untuk mengaruhi hidup dengan penuh cinta..

Kepada Papa H. Zainal dan Mama Yasnidar, S.Pd.

Kakakku dan adik-adikku (Uni Liza, Haris dan Wawan)

Serta seluruh keluarga besarku...

Setiap pengorbanan dan doa yang keluar dari ucapan

Menuntunkan untuk meraih masa depan yang cemerlang

Semoga Allah membalasnya dan meninggikan derajatmu

Disisi Nya..... Amin.....

*Buat Wenno Aditam, S.T, Tersayang (terima kasih atas seluruh perhatian
pengorbanan dan motivasinya selama ini, semoga kita selalu bersama-sama
dalam mencapai Rjdh-Nya), Amien....*

Untuk kak Widia is the Best!! gokil habis daH haha...

Buat ipit juga makasih ya atas kebaikannya selama ini, makasih ya..

Tetap semangat!!!.....

Terimalah ini sebagai bukti cinta dan kasihku untuk


Orang-orang yang kusayangi

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan

Amin....

With Love

Rahma Yenita




	No Alumni Universitas	Rahma Yenita	No Alumni Fakultas:
a). Tempat/ Tgl lahir : Sulit Air / 25 Agustus 1988 b). Nama Orang Tua : H.Zainal dan Yasnidar S.pd c). Fakultas : Ekonomi d). Jurusan : Ilmu Ekonomi e). No.Bp : 06951009 f). Tgl Lulus : 23 Desember 2010 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,13 i). Lama Studi : Empat Tahun Empat Bulan j). Alamat Orang Tua : Jl. Kacang Baririk Koto Tuo Sulit Air, Kabupaten Solok.			

Analisis Pengembangan Usaha Sektor Informal
(Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Solok)
Skripsi S1 Oleh: Rahma Yenita
Pembimbing: Fery Andrianus, SE, MSI

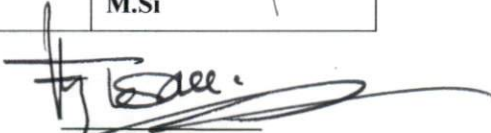
Abstrak:

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi usaha pedagang kaki lima, pengaruh pemberdayaan yang di ikuti pedagang kaki lima, manajemen pengelolaan pedagang kaki lima, serta respon pedagang kaki lima terhadap retribusi dan pajak yang nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengujian dilakukan dengan menggunakan Analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer (Survey lapangan) dengan menggunakan SPSS. Analisis kualitatif dengan menggunakan Crosstabs (Tabulasi silang). Setelah dilakukan pengujian ditemukan bahwa pedagang kaki lima di pasar raya kota Solok berpengaruh cukup besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Ini di lihat dari pemberdayaan yang di fokuskan pada pelatihan, bantuan modal, manajemen usaha guna mendapatkan keuntungan usaha. Berdasarkan penelitian ini, maka penulis memberikan saran perlu adanya program pembinaan dalam menumbuh kembangkan semangat wirausaha dan program pelatihan dan bimbingan terpadu untuk setiap pelaku PKL terutama berkaitan dengan cara-cara mengelola usaha.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada 23 Desember 2010.
 Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan penguji

Tanda Tangan			
Nama Terang	Fery Andrianus, SE, M.Si	Drs. M. Nazer, MA	Neng Kamarni, SE, M.Si

Mengetahui :
 Ketua Jurusan : Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing
 NIP. 130812952


 Tanda Tangan

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbialamin* sebagai rasa terima kasih dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengembangan Usaha Sektor Informal (Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Solok)"**.

Didorong dengan semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada Allah SWT, penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu syarat akademis yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 di Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. My Beloved Parents, Papa H. Zainal dan Mama Yasnidar S.Pd yang dengan penuh kasih sayang dan kesabaran membesarkan, memberikan perhatian begitu besar, memberikan dukungan penuh selama dalam penyelesaian skripsi ini serta do'a dan pengorbanan yang tak ternilai yang selalu mengiringi dalam setiap langkah kepada penulis. My Sister Yuliza Eka Saputri yang begitu besar perhatiannya buat penulis serta

adik-adikku tersayang Faizal Haris dan Wawan Kurniawan, terima kasih untuk do'a, bantuan, dan semua yang telah diberikan kepada penulis.

2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Syafruddin Karimi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, Mec, DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Ferry Andrianus, SE, MSi selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Neng Kamarni, SE, MSi selaku Ketua Program Ekstensi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
7. Bapak Syon Syarid, SE, ME selaku mantan Ketua Program Ekstensi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis serta kepada staf Biro Akademik Jurusan Ilmu Ekonomi khususnya Pak Oyon yang telah banyak membantu kami selama perkuliahan.
9. Buat wenna Aditama yang telah memotivasi agar penulis bisa cepat menyelesaikan skripsi. Thank you so much for support Wish you All The Best!!!.
10. Teman-teman IE 06 yang tidak bisa disebutkan satu per satu *"thanks for everything and succesful"*.

11. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu , terima kasih.

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi ini menyadari akan kekurangan dan kelemahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima saran dan kritikan yang akan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, Desember 2010

(Rahma Yenita)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penulisan	5
1.5. Ruang Lingkup Penulisan.....	5
1.6. Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.....	8
2.1.1 Konsep Pemberdayaan	8
2.1.2 PKL Sebagai Bagian dari Usaha Kecil Di Sektor Informal ...	14
2.1.3 Konsep Pendapatan/Keuntungan (provitability)	28
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah	30
2.2 Pemikiran Teoritis	36
2.3 Penelitian Terdahulu.....	43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian	46
3.2 Data dan Sumber Infomasi	46
3.3 Lokasi dan Sampel Penelitian	47
3.4 Teknik Pengolahan dan Analisa Data	49
3.5 Kerangka atau Alur Pemikiran	50

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

4.1 Luas Wilayah Dan Batas Wilayah.....	51
4.2 Iklim dan Curah Hujan	52
4.3 Struktur Tanah dan Hidrologi.....	52

4.4 Penggunaan Lahan	52
4.5 Karakteristik Sosio Demografis	53
4.6 Ketenagakerjaan	54
4.7 Keuangan Daerah	55
4.8 Gambaran Kondisi PKL kota Solok.....	56

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	59
5.1.1 Karakteristik Responden	59
5.1.2 Kondisi Usaha	65
5.1.3 Kebutuhan Pembiayaan Investasi	70
5.1.4 Pajak dan Retribusi	80
5.1.5 Pengelolaan Manajemen Keuangan	82
5.2 Pembahasan	83

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	88
6.2 Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Karakteristik atau Ciri Ciri PKL Berdasarkan Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan.	25
Tabel 3.1	Jumlah Populasi & Sampel	48
Tabel 4.1	Kondisi Penduduk Kota Solok Tahun 2008	53
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Kota Solok Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2008.....	54
Tabel 4.3	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Lapangan Pekerjaan tahun 2008.....	55
Tabel 4.4	Keadaan Toko, kios, PKL, dan Peti Dikantor Pengelolaan pasar ...	58
Tabel 5.1	Karakteristik Responden berdasarkan Pengelompokan Jenis Usaha	59
Tabel 5.2	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Pengelompokan Jenis Usaha	60
Tabel 5.3	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Umur	61
Tabel 5.4	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Status Perkawinan	61
Tabel 5.5	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Pendidikan	62
Tabel 5.6	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Tahun Mulai Usaha	63
Tabel 5.7	Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Keuntungan yang diperoleh/ omset per bulan	64
Tabel 5.8	Kondisi usaha PKL dilihat dari perkembangan omset usaha dalam setahun berdasarkan pengelompokkan jenis usaha dalam setahun terakhir	65
Tabel 5.9	Kondisi usaha PKL dilihat dari penyebab menurunnya kondisi usaha berdasarkan pengelompokkan jenis usaha	66
Tabel 5.10	Kondisi usaha PKL dilihat dari penyebab meningkatnya kondisi usaha berdasarkan pengelompokkan jenis usaha	68

Tabel 5.11	Kebutuhan Pembiayaan Investasi berdasarkan pengelompokan jenis usaha	70
Tabel 5.12	Kebutuhan Pembiayaan Investasi berdasarkan pengelompokan jenis usaha	71
Tabel 5.13	Alasan PKL memperoleh pembiayaan investasi non bank berdasarkan pengelompokan jenis usaha.....	73
Tabel 5.14	Penggunaan pembiayaan investasi yang diperoleh berdasarkan pengelompokan jenis usaha.....	74
Tabel 5.15	Alasan PKL tidak mendapatkan pembiayaan investasi berdasarkan pengelompokan jenis usaha.....	75
Tabel 5.16	Rencana perluasan/ mengembangkan usaha berdasarkan pengelompokan jenis usaha.....	76
Tabel 5.17	Prospek pengembalian kredit berdasarkan pengelompokan jenis usaha	78
Tabel 5.18	Kendala yang menyebabkan kemacetan pengembalian kredit berdasarkan pengelompokan jenis usaha.....	78
Tabel 5.19	Pembayaran pajak oleh PKL berdasarkan pengelompokan jenis usaha	80
Tabel 5.20	Pembayaran retribusi oleh PKL berdasarkan pengelompokan jenis usaha	81
Tabel 5.21	Pengelolaan Manajemen Usaha oleh PKL berdasarkan pengelompokan jenis usaha.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa (Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya, 1988; Siagian, 1985).

Perlu pula disadari bahwa proses percepatan pembangunan yang terlalu menitik-beratkan pada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa dimbangi dengan pemerataan pendapatan untuk membangun ekonomi rakyat, maka misi pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat akan terabaikan sehingga basis ekonomi rakyat (nasional) mengalami kegoncangan bahkan rapuh yang diawali dengan krisis ekonomi dan moneter.

Dengan adanya krisis ekonomi dan moneter, maka terjadi kelumpuhan ekonomi nasional terutama di sektor riil yang berakibat terjadinya PHK besar-besaran dari perusahaan-perusahaan swasta nasional. Hal ini berujung pada munculnya pengangguran di kota-kota besar, termasuk Kota Solok sebagai obyek penelitian ini. Sebagaimana di kota-kota besar lainnya, kota Solok merupakan kota perdagangan adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Salah satu sektor informal yang

banyak diminati para pengangguran (selain yang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang kaki lima.

Kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan yang turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Selain itu, kelompok pedagang kaki lima mempunyai potensi yang cukup besar untuk memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor penerimaan retribusi daerah seiring dengan kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Lepas dari beberapa keunggulan yang dimiliki kelompok usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima ternyata pendapatan rata-rata pertahun masih tergolong rendah. Hasil pengamatan sementara menunjukkan bahwa kondisi ini diduga bersumber dari dua hal pokok, yaitu (1) faktor internal kelompok pedagang kaki lima itu sendiri; dan (2) faktor eksternal, yakni kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil (termasuk pedagang kaki lima). Masalah yang berkaitan dengan faktor internal, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dan keterampilan dalam berusaha; perilaku konsumtif (konsumerisme), kebanyakan dari mereka belum mempunyai modal sendiri

(sumber modal sebagian dari rentenir, dan sebagian dari barang-barang yang dijual adalah barang-barang komisi).

Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, khususnya pedagang kaki lima yang hingga saat ini baru sebagian kecil saja yang telah memperoleh pembinaan pihak-pihak terkait. Kedua hal pokok di atas merupakan faktor-faktor yang berkaitan langsung dengan masalah pemberdayaan sektor informal, khususnya pengelolaan pedagang kaki lima, yakni masalah pengelolaan unsur manusia (pelatihan), pengelolaan unsur uang (modal kerja) dan pengelolaan unsur metode (manajemen usaha) dalam upaya meningkatkan pendapatan guna memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari uraian di atas terlihat bahwa perkembangan sektor informal khususnya pedagang kaki lima di Kota Solok dapat memegang peranan penting dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul “ **ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Kota Solok) “**

1.2. Perumusan Masalah

Beranjak dari indentifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana kondisi usaha pedagang kaki lima (PKL) di pasar raya Kota Solok.
- 2) Bagaimana pengaruh pemberdayaan yang telah di ikuti pedagang kaki lima (PKL) terhadap peningkatan usaha mereka.
- 3) Bagaimana manajemen pengelolaan usaha pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solok.
- 4) Bagaimana respon pedagang kaki lima (PKL) terhadap retribusi dan pajak di Kota Solok.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mengkaji kondisi usaha pedagang kaki lima (PKL) di pasar raya Kota Solok.
- 2) Mengkaji pengaruh pemberdayaan yang telah di ikuti pedagang kaki lima (PKL) terhadap peningkatan usaha mereka.
- 3) Mengkaji manajemen pengelolaan usaha pedagang kaki lima (PKL) di Kota Solok.
- 4) Mengkaji respon pedagang kaki lima (PKL) terhadap retribusi dan pajak.

1.4. Manfaat Penulisan

Mengacu pada tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian diharapkan bermanfaat ganda. Di satu sisi, secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah hasanah pengembangan ilmu pengetahuan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberi kontribusi bagi pihak-pihak terkait, seperti Dinas Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil, Dinas Pasar, BUMN dan lain-lain dalam upaya memberdayakan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima dalam rangka peningkatan pendapatan (profit) usaha, sekaligus meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi guna memacu penyelenggaraan otonomi daerah.

1.5. Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini memberikan batasan pada beberapa hal dibawah ini :

- 1) Penelitian ini hanya menitikberatkan pada upaya pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang difokuskan pada beberapa dimensi saja, antara lain : pelatihan, bantuan modal, dan manajemen usaha kecil menengah guna mendapatkan profit ataupun keuntungan usaha yang nantinya akan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Penerimaan pendapatan asli daerah di fokuskan dari pembayaran retribusi oleh pedagang kaki lima.
- 3) Penelitian hanya dibatasi pada lokasi pasar raya kota Solok.

1.6. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah ini terdiri dari enam bab yaitu: Bab I tentang pendahuluan, Bab II berisi tinjauan pustaka, Bab III metodologi penelitian, Bab IV mengenai gambaran umum wilayah studi, Bab V analisa data dan pembahasan dan pada Bab VI berisi Kesimpulan Dan saran.

Pada Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, , perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan dan sistematika penulisan.

Pada Bab II dijelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi uraian dari teori-teori yang relevan dan menunjang penelitian serta melandasi pemecahan masalah yang di lakukan.

Pada Bab III akan dijelaskan metodologi penelitian yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah mulai dari awal hingga akhir penelitian.

Pada Bab IV merupakan gambaran umum wilayah studi tentang keadaan daerah yang meliputi letak wilayah, perkembangan penduduk serta gambaran kondisi pedagang kaki lima.

Pada Bab V akan dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil pengumpulan dan pengolahan data yang berorientasi pada tujuan penelitian

Pada Bab VI adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah di lakukan serta saran dan masukan yang berguna agar di peroleh penelitian yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Sosial di Kopenhagen Tahun 1992 juga telah memuatnya dalam berbagai kesepakatannya. Namun, upaya mewujudkannya dalam praktik pembangunan tidak selalu berjalan mulus. Banyak pemikir dan praktisi yang belum memahami dan mungkin tidak meyakini bahwa konsep pemberdayaan merupakan alternatif pemecahan terhadap dilema-dilema pembangunan yang dihadapi. Mereka yang berpegang pada teori-teori pembangunan model lama juga tidak mudah untuk menyesuaikan diri dengan pandangan-pandangan dan tuntutan-tuntutan keadilan. Mereka yang tidak nyaman terhadap konsep partisipasi dan demokrasi dalam pembangunan tidak akan merasa tentram dengan konsep pemberdayaan ini. Lebih lanjut, disadari pula adanya berbagai bias terhadap pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people-centered, participatory, empowering, and sustainable”* (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih

lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan dimasa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedmann (1992) disebut *alternative development*, yang menghendaki “*inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity*”.

Konsep pemberdayaan tidak mempertentangkan pertumbuhan dengan pemerataan, karena seperti dikatakan oleh Donald Brown (1995), keduanya tidak harus diasumsikan sebagai “*incompatible or antithetical*”. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap “*zero-sum game*” dan “*trade off*”. Ia bertitik tolak dari pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Kirdar dan Silk (1995), “*the pattern of growth is just as important as the rate of growth*”. Yang dicari adalah seperti dikatakan Ranis, “*the right kind of growth*”, yakni bukan yang vertikal menghasilkan “*trickle-down*”, seperti yang terbukti tidak berhasil, tetapi yang bersifat horizontal (*horizontal flows*), yakni “*broadly based, employment intensive, and not compartmentalized*” (Ranis, 1995). Hasil pengkajian berbagai proyek yang dilakukan oleh *International Fund for Agriculture Development* (IFAD) menunjukkan bahwa dukungan bagi produksi yang dihasilkan masyarakat di lapisan bawah telah memberikan sumbangan pada pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi yang sama pada sektor-sektor yang skalanya lebih besar. Pertumbuhan itu dihasilkan bukan hanya dengan biaya lebih kecil, tetapi

dengan devisa yang lebih kecil pula (Brown, 1995). Hal terakhir ini besar artinya bagi Negara-negara berkembang yang mengalami kelangkaan devisa dan lemah posisi neraca pembayarannya.

Lahirnya konsep pemberdayaan sebagai antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut :

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau system pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulative untuk memperkuat legitimasi.
- d. Pelaksanaan sistem pengetahuan, system politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya (Priyono dan Pranarka, 1996). Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Alur pikir di atas sejalan dengan terminologi pemberdayaan itu sendiri atau yang dikenal dengan istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya

(*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar.

Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam pemilikan atau akses pada sumber-sumber *power*. Proses historis yang panjang menyebabkan terjadinya *power dis powerment*, yakni peniadaan *power* pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasai oleh mereka yang memiliki *power*. Pada gilirannya keterbelakangan secara ekonomi menyebabkan mereka makin jauh dari kekuasaan. Begitulah lingkaran setan itu berputar terus. Oleh karena itu, pemberdayaan bertujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, menurut Priyono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Menurut Sumodiningrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan system pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya bahwa apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Dalam kerangka pikir inilah upaya memberdayakan masyarakat pertama-tama haruslah dimulai

dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1996).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya pemberdayaan itu sendiri. Pemberdayaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberdayaan sektor informal, khususnya kelompok pedagang kaki lima sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan penanganan atau pengelolaan tersendiri dari pihak pemerintah yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya yang mereka miliki yang pada gilirannya akan mendorong

peningkatan pendapatan/profit usaha sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pendapatan daerah dari sektor retribusi daerah.

2.1.2. PKL Sebagai Bagian dari Usaha Kecil Di Sektor Informal

Di dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan. Adapun usaha kecil tersebut meliputi : usaha kecil formal, usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional. Usaha kecil formal adalah usaha yang telah terdaftar, tercatat dan telah berbadan hukum, sementara usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung. Sedangkan usaha kecil tradisional adalah usaha yang menggunakan alat produksi sederhana yang telah digunakan secara turun temurun dan/atau berkaitan dengan seni dan budaya. Dalam UU. Nomor 9 Tahun 1995 juga ditetapkan beberapa Kriteria Usaha Kecil, antara lain :

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 (satu) milyar rupiah.
- 3) Milik warga Negara Indonesia.

- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- 5) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Usaha Kaki Lima adalah bagian dari Kelompok Usaha Kecil yang bergerak di sektor informal, yang oleh istilah dalam UU. No. 9 Tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah "Pedagang Kaki Lima". Konsepsi sektor informal mendapat sambutan yang sangat luas secara internasional dari para pakar ekonomi pembangunan, sehingga mendorong dikembangkannya penelitian pada beberapa negara berkembang termasuk Indonesia oleh berbagai lembaga penelitian pemerintah, swasta, swadaya masyarakat dan universitas. Hal tersebut terjadi akibat adanya pergeseran arah pembangunan ekonomi yang tidak hanya memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi makro semata, akan tetapi lebih kearah pemerataan pendapat.

Swasono (1987) mengatakan bahwa adanya sektor informal bukan sekedar karena kurangnya lapangan pekerjaan, apalagi menampung lapangan kerja yang terbuang dari sektor informal akan tetapi sektor informal adalah sebagai pilar bagi keseluruhan ekonomi sektor formal yang terbukti tidak efisien. Hal ini dapat menunjukan bahwa sektor informal telah banyak mensubsidi sektor formal, disamping sektor informal merupakan sektor yang efisien karena mampu menyediakan kehidupan murah.

Konsepsi ekonomi sektor informal baru muncul dan terus dikembangkan sejak tahun 1969 pada saat *International Labor Organization (ILO)* mengembangkan program *World Employmen Programme (WEP)*. Program bertujuan untuk mencari strategi pembangunan ekonomi yang tepat, yang mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan di dunia ketiga (negara berkembang), sebagai akibat adanya suatu kenyataan bahwa meskipun membangun ekonomi telah dipacu namun tingkat pengangguran di negara berkembang tetap tinggi. Melalui program tersebut telah dilakukan penelitian tentang ketenagakerjaan di Colombia, Sri Lanka dan Kenya (Moser 1978, dalam Chandrakirana dan Sadoko, 1995).

Pada tahun 1972, *International Labor Organization (ILO)* menerbitkan laporan hasil penelitian ketenagakerjaan di Kenya, yang antara lain menyimpulkan bahwa inti permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi di Kenya bukanlah pengangguran semata, melainkan juga akibat banyaknya pekerjaan yang tidak menghasilkan pendapatan yang memadai (dibawah garis kemiskinan), serta rendahnya tingkat produktivitas dan pemanfaatan (*under utilization*) tenaga kerja.

Dalam kondisi yang demikian *Interntional Labor Organization (ILO)* menemukan adanya kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi yang mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik kompetitif, padat karya, memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar kepemilikan sendiri oleh masyarakat lokal. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang kemudian dinobatkan sebagai sektor informal. Disimpulkan pula bahwa untuk memecahkan masalah ketenagakerjaan di Kenya,

pengembangan kegiatan-kegiatan informal tidak boleh diabaikan (Mosher, 1978 dalam Chandrakirana dan Sadoko, 1995).

Sektor informal itu sendiri, pertama kali diperkenalkan Keith Hart seorang peneliti dari Universitas Manchester di Inggris (Harmono, 1983) yang kemudian muncul dalam penerbitan ILO (1972) sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut ILO dalam Sudarsono (1982) memberikan definisi tentang sektor informal sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pengusaha pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya dan teknologi yang disesuaikan dengan keterampilan yang dibutuhkan, tidak diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar penuh persaingan.

Dieter-Evers dikutip Rachbini dan Hamid (1994) menganalogikan sektor informal sebagai sebuah bentuk ekonomi bayangan dalam negara. Ekonomi bayangan digambarkan sebagai kegiatan ekonomi yang tidak mengikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kegiatan ekonomi bayangan merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang bergerak dalam unit-unit kecil sehingga bisa dipandang efisien dalam memberikan pelayanan. Dilihat dari sisi sifat produksinya, kegiatan ini bersifat subsistem yang bernilai ekonomis dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya bagi masyarakat yang ada dilingkungan sektor informal.

Hutajulu (1985) memberikan batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang kegiatan ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat izin

serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya Sethurahman (1985) memberi batasan sektor informal ini sebagai unit-unit usaha berskala kecil yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang-barang, dimasuki oleh penduduk kota terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan dari pada memperoleh keuntungan.

Sedangkan menurut Moser, 1978 dalam Chandrakirana dan Sadoko (1995) bahwa sektor informal merupakan kegiatan ekonomi yang selama ini lolos dari pencacahan, pengaturan dan perlindungan pemerintah, tetapi mempunyai makna ekonomi dengan karakteristik kompetitif, padat karya, memakai input dan teknologi lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat lokal, serta beroperasi atas dasar pemilikan sendiri oleh masyarakat. Menurut Rachbini dan Hamid (1994), sektor informal berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa terutama bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah yang tinggal dikota-kota. Pelaku sektor ini pada umumnya berasal dari desa-desa dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah serta sumber-sumber terbatas. Pada dasarnya suatu kegiatan sektor informal harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (*profit*) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin.

Menurut definisi, sektor informal adalah kegiatan ekonomi marginal (kecil-kecilan) yang salah satu cirinya adalah tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga secara luwes dapat menyerap tingkat pendidikan yang rendah. Dengan demikian besarnya jumlah tenaga kerja yang mempunyai

tingkat pendidikan rendah juga akan mempengaruhi perkembangan sektor informal di perkotaan.

Richardson (1991) berpendapat bahwa keputusan-keputusan penentuan lokasi yang memaksimalkan penerimaan biasanya diambil bila memenuhi kriteria-kriteria pokok :

1. Tempat yang memberi kemungkinan pertumbuhan jangka panjang yang menghasilkan keuntungan yang layak.
2. Tempat yang luas lingkungannya untuk kemungkinan perluasan unit produksi.

Jadi jelasnya bahwa pengertian sektor informal mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, artinya bahwa kegiatan yang paling besar dijalankan oleh penduduk berpendapatan rendah. Di Indonesia, sudah ada kesepakatan tentang 11 ciri pokok sektor informal sebagai berikut :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal.
2. Pada umumnya unit usaha tidak mempunyai ijin usaha.
3. Pola kegiatan usaha tidak teratur baik dalam arti lokasi maupun jam kerja.
4. Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi tidak sampai ke pedagang kaki lima.
5. Unit usaha mudah keluar masuk dari satu sub-sektor ke lain sub-sektor.

6. Teknologi yang digunakan bersifat primitif.
7. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasi juga relatif kecil.
8. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak memerlukan pendidikan formal karena pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.
9. Pada umumnya unit usaha termasuk golongan *one-man enterprise* dan kalau mengerjakan buruh berasal dari keluarga.
10. Sumber dana modal usaha yang umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga keuangan yang tidak resmi.
11. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat desa-kota berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga yang berpenghasilan menengah (Hidayat, 1987).

Secara umum, pedagang dapat diartikan sebagai penyalur barang dan jasa-jasa perkotaan (Rais dalam Umboh, 1990). Adapun menurut McGee yang dikutip Young (1977) mendefinisikan pedagang kaki lima adalah "*The People who offer goods or services for sale from public places, primarily streetes and pavement*". Sedangkan Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin.

Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini

termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminal pada batas-batas tertentu.

Dari pengertian atau batasan tentang pedagang kaki lima sebagaimana dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima merupakan bagian dari kelompok usaha kecil yang bergerak di sektor informal. Secara khusus, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai distribusi barang dan jasa yang belum memiliki ijin usaha dan biasanya berpindah-pindah.

Menurut Sethurahman (1985) bahwa istilah pedagang kaki lima biasanya untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, tetapi akan menyesatkan bila disebut dengan “perusahaan” berskala kecil karena beberapa alasan, antara lain :

1. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan rendah (kebanyakan para migran).

Jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukanlah pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.

2. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi dirinya sendiri.
3. Pedagang kaki lima di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat dalam produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam suatu proses evaluasi daripada

dianggap sebagai perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan (input) modal dan pengolahan yang besar.

Selanjutnya menurut definisi International Labour Organization (ILO), pedagang kaki lima didefinisikan sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh di luar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh (Hadji Ali, 1985).

Menurut Latifah Hanum, Semakin metropolis sebuah daerah, maka semakin terbuka ruang bagi pelaku sektor informal untuk memasuki dan memenuhi sudut-sudut kota. Kegiatan sektor informal disekitar ekonomi formal sangat menarik, dimana komunitas yang secara fisik berbeda berbaur menjadi satu lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Paradok ini menjadi penglihatan rutin yang dapat dijumpai hampir setiap waktu diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Keberadaan mereka juga sangat mudah dijumpai dan dikenali di trotoar-trotoar, alun-alun kota, pinggir-pinggir toko, depan pusat – pusat perbelanjaan, dan dekat-dekat pusat keramaian kota. Sarana yang mereka gunakan antara lain adalah hamparan dilantai, meja, kios, gerobak/ kereta dorong, dan lain-lain. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan sektor informal memiliki pengaruh yang besar dalam kontribusinya untuk turut serta dalam peningkatan perekonomian di suatu daerah. Ini dilatarbelakangi oleh pentingnya upaya pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) itu sendiri. PKL merupakan

bagian yang sangat penting dalam sistem perekonomian nasional khususnya dalam peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Oleh karenanya, PKL seharusnya memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah dalam hal pembinaan dan penataannya agar dapat tercipta kenyamanan berusaha dan iklim usaha yang kondusif bagi PKL.

Menurut Wirosardjono (1985) pengertian pedagang kaki lima adalah kegiatan sektor marginal (kecil-kecilan) yang mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Pola kegiatan tidak teratur baik dalam hal waktu, permodalan maupun penerimaannya.
2. Tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan “liar”).
3. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan dasar hitung harian.
4. Pendapatan mereka rendah dan tidak menentu.
5. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha yang lain.
6. Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
7. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.

8. Umumnya tiap-tiap satuan usaha yang mempekerjakan tenaga yang sedikit dan dari lingkungan keluarga, kenalan atau berasal dari daerah yang sama.
9. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, perkreditan dan sebagainya.

Sebagai saluran arus barang dan jasa, pedagang kaki lima merupakan mata rantai akhir sebelum mencapai konsumen dari satu mata rantai yang panjang dari sumber utamanya yaitu produsennya (Ramli, 1984).

Pembagian tipe komoditas yang dijual PKL, oleh MCGee dan Yeung (1977:81) dibedakan 4 (empat) kelompok yakni :

1. Makanan yang tidak diproses dan semi olahan (*unprocessed and semi processed food*). Makanan yang tidak diproses, termasuk makanan mentah seperti daging, buah-buahan atau sayuran. Sedangkan makanan yang semi olahan seperti beras.
2. Makanan siap saji (*Prepared food*), yakni penjual makanan yang sudah dimasak.
3. Barang bukan makanan (*nonfood items*), kategori ini terdiri dari barang-barang dalam skala yang luas, mulai dari tekstil hingga obat-obatan.
4. Jasa (*services*), yang terdiri dari beragam aktivitas seperti jasa perbaikan sol sepatu dan tukang cukur.

Firdausy (1995) merangkum seluruh gambaran akan PKL ke dalam tiga aspek, yakni: Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya dan Lingkungan.

Karakteristik dari masing-masing aspek tersebut dapat di lihat dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Karakteristik atau Ciri Ciri PKL Berdasarkan Aspek Ekonomi, Sosial Budaya dan Lingkungan.

Aspek	Karakteristik
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Meliputi berbagai kegiatan usaha yang luas - Mudah dimasuki oleh pemain baru - Modal relatif kecil - Konsumen lokal dan berpendapatan menengah kebawah - Teknologi sederhana/ tanpa teknologi - Jaringan usaha terbatas
Sosial Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan rendah - Terdiri atas apara migran - Jumlah anggota rumah tangga besar - Bertempat tinggal didaerah kumuh di kota - Jumlah jam kerja relatif lama
Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurang mengutamakan kebersihan - Berlokasi di daerah yang padat lalu lintasnya - Menggunakan fasilitas umum

Sumber : Firdausy (1995)

Di sisi lain, Kartono dkk (1980) menjelaskan pengertian PKL melalui pemaparan ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti produsen.
2. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat atau stand yang tidak permanen serta bongkar pasang).
3. Menjajakan bahan makanan, minuman atau barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.

4. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
5. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan relatif rendah dan biasanya tidak memiliki standar yang jelas.
6. Volume peredaran uang tidak seberapa besar, para pembeli umumnya merupakan pembeli yang berdaya beli rendah.
7. Usaha skala kecil bisa merupakan *family enterprise*, di mana ibu dan anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas pada usaha perdagangan kaki lima.
9. Dalam melaksanakan pekerjaannya ada yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada pula yang melaksanakan secara musiman.
10. Barang yang dijual biasanya merupakan *convenience goods*, jarang sekali *speciality goods*.
11. Seringkali berada dalam suasana psikologis tidak tenang, diliputi perasaan takut kalau tiba-tiba kegiatan mereka dihentikan oleh Tim Penertiban Umum (Tibum) sebagai aparat pemerintah daerah. PKL pada umumnya adalah *self employed*, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, tetapi biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari

supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Hal ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, disebabkan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978). Mereka yang masuk dalam kategori PKL ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*primeage*) (Soemadi, 1993). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa PKL menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha PKL ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya.

Lokasi PKL sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para PKL, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan.

Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para PKL berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan PKL belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit (Hidayat, 1978).

Dalam praktek, PKL sering menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga bersaing atau bahkan relatif tinggi, bahkan terkesan menjurus ke arah penipuan. Hal ini tentu saja menimbulkan citra yang negatif tentang PKL. Adanya tawar-menawar antara penjual dan pembeli inilah yang menjadikan situasi unik dalam

usaha PKL. Pada umumnya PKL kurang memperhatikan masalah lingkungan dan faktor *hygiene* sebagai produk sampingan yang negatif. Masalah lingkungan berkaitan erat dengan kepadatan, misalnya kepadatan lalu lintas maupun kepadatan tempat. Hasil penelitian Purwanugraha dan Harsiwi (2002) menunjukkan bahwa menjadi PKL menjadi salah satu alternatif pekerjaan karena persaingan mencari kerja yang begitu ketat dan kurangnya keterampilan untuk memasuki dunia kerja di sektor formal.

2.1.3. Konsep Pendapatan/Keuntungan (provitability)

Secara etimologis pendapatan berasal dari kata "dapat" yang beroleh, diperoleh, kena; misalnya: Upah sepuluh ribu rupiah. Kemudian mendapat tambahan awalan 'pen' dan akhiran 'an' yang artinya hasil pencarian atau usaha, perolehan; misalnya, sebulan tidak kurang dari lima puluh ribu rupiah, (Poerwadarminta, 1984). Jadi, pendapatan adalah hasil pencaharian atau usaha yang diperoleh seseorang dalam sehari atau sebulan.

Menurut Winardi dalam Kamus Ekonomi (1981), bahwa pendapatan atau penghasilan itu sama artinya dengan hasil berupa uang atau material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Suparmoko (1981) berpendapat bahwa pendapatan seseorang adalah pendapatan yang telah diperoleh dari suatu kegiatan jenis usaha yang menghasilkan suatu keuntungan.

Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi

ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu : pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi.

Pembagian diatas berkaitan dengan, status, pendidikan dan keterampilan serta jenis pekerja seseorang. Namun sifatnya sangat relatif. Pendapatan seseorang pegawai negeri golongan IV dengan pendidikan sarjana akan kalah bila dibandingkan dengan pendapatan seseorang pedagang yang sukses walaupun hanya berpendidikan SLTP. Akan tetapi dari segi status dan sisi-sisi kehidupan yang lain antara keduanya memiliki perbedaan dalam pandangan masyarakat, karena taraf hidup bukan saja diukur dari segi material, akan tetapi dari segi moral tidak kalah pentingnya. Sebagaimana pendapat diatas, bahwa pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat, oleh karenanya setiap orang yang bergelut dalam suatu jenis pekerjaan tertentu termasuk pekerjaan disektor informal, berupaya untuk selalu meningkatkan pendapatan dari hasil usahanya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sedapat mungkin pendapatan yang diperoleh dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya.

Kaitannya dengan analisa pendapatan/keuntungan (*profitabilitas*) suatu perusahaan, termasuk usaha pedagang kaki lima, menurut Riyanto (1995) bertujuan untuk mengukur kemampuan laba (*profitability*) suatu usaha/perusahaan dalam memanfaatkan sumberdaya ekonominya, untuk sasaran tujuan tertentu.

Sumberdaya ekonominya tersebut pada umumnya dalam bentuk angka "*total assets*" seperti tercantum dalam neraca (*balance sheet*) perusahaan yang sudah diperiksa (*audited*).

Dalam menghitung pendapatan/keuntungan usaha digunakan beberapa konsep, di antaranya adalah *Return on Investment* (ROI). ROI dapat diperoleh dengan cara mengalikan antara perputaran (*turn over*) "*total asset*" dengan keuntungan marginal penjualan.

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah bisa diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan dan ekonomi yang baik, karena penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab membutuhkan kemampuan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta antara provinsi dan pemerintah kota. Hal ini berarti secara finansial daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat dan harus mampu menggali sebanyak mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah (Dhiratanayakianant, 1984). Dalam pelaksanaannya berbagai permasalahan masih terjadi di daerah, mulai dari penyusunan Perda sebagai pelaksanaan otonomi tersebut sampai dengan masalah klasik terbatasnya dana. Keterbatasan dana di daerah menjadi masalah yang sangat krusial yang diperkirakan dapat menghilangkan makna otonomi daerah. Beberapa daerah mengalami kesulitan dalam membiayai kebutuhan pembangunan daerahnya. Mengatasi kekurangan dana tersebut beberapa daerah telah mengeluarkan berbagai Peraturan Daerah (PERDA) sebagai dasar untuk mengenakan pungutan

berupa pajak dan retribusi dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi ditentukan oleh berbagai variabel, yaitu : variabel pokok yang terdiri dari kemampuan keuangan, organisasi dan masyarakat, variabel penunjang yang terdiri dari faktor geografi dan sosial budaya serta variabel khusus yang terdiri atas aspek politik dan hukum (Anonymous, 1998).

Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang titik berat otonomi di daerah kabupaten/kota. Sementara PP Nomor 25 Tahun 1999 tentang kewenangan pemerintah, disebutkan bahwa unsur-unsur yang tidak diserahkan atau masih kewenangan pusat yakni peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang secara nasional lebih berdaya guna jika tetap ditangani oleh pemerintah pusat (Anonymous, 1999). Lebih lanjut dikatakan bahwa Otonomi fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan derajat otonomi fiskal daerah di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih rendah. Kondisi ini secara nyata dapat dilihat pada rendahnya PAD.

Suparmoko (1994) menyatakan bahwa sentralisasi fiskal di Indonesia sangat tinggi dan distribusi bantuan antara provinsi atau kabupaten kota sangat tidak merata. Oleh sebab itu adanya asas desentralisasi pemerintahan dengan sendirinya setiap daerah harus dapat mengurus rumah tangga daerahnya secara mandiri serta diwajibkan untuk menggali segala kemungkinan sumber keuangan sendiri sesuai dengan batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berdasarkan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber-sumber pendapatan daerah dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (UU-PKPD) sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan dipungut berdasarkan Perda (Anonymous, 1999)

2) Dana Perimbangan / Dana Transfer.

Pendapatan yang diperoleh dari bagian daerah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan penerimaan dari sumber daya alam atau dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan dana dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Bagian daerah dari penerimaan SDA adalah bagian penerimaan daerah yang berasal dari pengolahan sumber daya alam , antara lain pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan dan perikanan. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang dialokasikan dengan tujuan pemantauan antar daerah, sehingga

semua daerah mempunyai kemampuan yang relative sama untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. Besarnya Dana Alokasi Khusus sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri. Dana Alokasi Khusus yakni dana untuk membantu daerah membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Termasuk dalam Dana Alokasi Khusus adalah dana reboisasi yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan imbalan 40% untuk daerah dan 60% untuk pusat.

3) Pinjaman Daerah

Pendapatan yang diperoleh bersumber dari pinjaman dalam negeri yaitu berasal dari pemerintah pusat atau lembaga kemersial atau penerbitan Obligasi daerah dan pinjaman dari luar negeri melalui pemerintah pusat.

4) Lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam undang-undang nomor 25 yang dimaksud dengan lain-lain penerimaan yang sah antara lain : hibah dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana Darurat diberikan jika daerah mempunyai keperluan yang mendesak dari APBN. Keperluan mendesak yakni terjadinya keadaan yang sangat luar biasa dan tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan APBD, seperti bencana alam, atau keadaanlain yang dinyatakan pemerintah pusat sebagai bencana Nasional.

Sebagaimana menurut UU No 22 Tahun 1999 Pendapatan asli daerah terdiri atas; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang sah. Dibanding pos-pos penerimaan Pendapatan asli daerah lainnya, pajak daerah merupakan pos penerimaan terbesar, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah selalu menempati urutan teratas. Pajak daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat, sehingga perlu di jaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Perpajakan Daerah dapat di artikan sebagai (K.J Davey,1988):

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan Nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan atau di pungut oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutanya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Sumber penerimaan lain dari pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya sesuatu fasilitas atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada pembayarnya. Retribusi daerah menurut UU No 34 Tahun 2000 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, yang terdiri dari retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi ini adalah layanan pemerintah kepada publik dengan diberikannya kontribusi langsung dari pihak yang menerima jasa kepada pihak yang mengelola atau memelihara dan mengadakan jasa tersebut.

Menurut Deddy Supriadi Bratakusumah (2003), peraturan daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut dan sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

1. Nama, Objek dan subjek Retribusi
2. Golongan Retribusi
3. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
4. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
5. Wilayah pemungutan
6. Tata cara pemungutan
7. Tata cara penagihan
8. Sanksi administrasi
9. Tanggal mulai berlakunya

Meskipun retribusi daerah masih di kategorikan “tax revenues” tapi terdapat perbedaan penting antara retribusi dan pajak. Pajak biasanya harus di bayar anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum tanpa pertimbangan apakah secara pribadi mereka mendapat manfaat atau tidak dari pelayanan yang mereka biayai. Sebaliknya, retribusi daerah dibayar langsung oleh mereka yang

menikmati suatu pelayanan dan biasanya untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanan.

Sumber pendapatan lainnya adalah laba BUMD, dimana laba atau profit dari perusahaan daerah di harapkan sebagai sumber pemasukan dari daerah dan hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan nantinya dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat dan membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Komponen terakhir adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan ini merupakan pendapatan daerah yang bukan berasal dari pajak dan dan retribusi daerah. Penerimaan dari komponen ini tidak terlalu berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.

2.2.Pemikiran Teoritis

Kaitannya dengan pemberdayaan sektor informal, khususnya pedagang kaki lima, maka hal penting yang perlu diberdayakan adalah faktor pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh kelompok pedagang kaki lima itu sendiri untuk mendorong peningkatan pendapatan/keuntungan (profitabilitas) usaha mereka.

Secara teoritis, beberapa pendapat mengemukakan bahwa terdapat sejumlah komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, yaitu :

- a) Modal kerja.
- b) Teknologi tepat guna
- c) Model manajemen usaha.

- d) Pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha.
- e) Ethos kerja, semangat dan disiplin kerja, dan sebagainya (Turang, 1995).

Dari beberapa faktor tersebut, maka penelitian ini hanya membatasi pada beberapa aspek penting dari pemberdayaan PKL, yaitu :

- a) Aspek SDM seperti pendidikan dan latihan/keterampilan (pelatihan) dalam upaya meningkatkan kemampuan/keterampilan berusaha.
- b) Aspek permodalan yaitu pemberian bantuan modal usaha (selain modal sendiri).
- c) Aspek metode kerja atau pengelolaan manajemen usaha, yaitu memberikan bantuan teknis berupa pembukuan (akuntansi) dalam mengelola usaha melalui bimbingan, penyuluhan di lapangan tentang cara-cara berusaha yang efisien dan efektif.
- d) Aspek peningkatan pendapatan/profit usaha.

Untuk itu perlu dibahas secara berurutan pengaruh keempat aspek pemberdayaan tersebut terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), sebagai berikut :

- a) Pengaruh pemberian pelatihan terhadap penerimaan PAD

Berbicara tentang pelatihan atau pendidikan dan latihan tidak terlepas kaitannya dengan konsep manajemen sumber daya manusia, sementara manajemen sumber daya manusia itu sendiri adalah bagaimana mengatur atau mengelola manusia sebagai salah satu

unsur utama manajemen yang meliputi : kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menempatkan, menggerakkan, mengendalikan dan mengevaluasi aktivitas manusia dalam proses pencapaian tujuan. Artinya bahwa jika kita ingin agar manusia mengoptimalkan produktivitasnya, maka kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu dikembangkan/ ditingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/keterampilan yang memadai dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dilakukan manusia itu sendiri (Soeroto, 1986). Asumsi ini berlaku pula bagi kelompok pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan aktivitas disektor informal, terutama dibidang ekonomi kerakyatan. Untuk lebih memahami konsep pengembangan kualitas SDM, berikut dikemukakan beberapa pendapat para ahli, antara lain : menurut Mangum, dalam Soeroto (1986) bahwa sumber daya manusia adalah semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan produktif kepada masyarakat.

Zainun (1993) mengartikan dengan daya yang bersumber pada manusia, yang dapat berupa tenaga (energi) ataupun kekuatan (*power*). Tenaga dan kekuatan yang bersumber dari manusia itu dapat berupa ide, ilmu pengetahuan, endapan pengalaman, dan lain-lain yang berupa potensi fisik, moral dan intelektual yang berwujud dalam bentuk pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan lain-lainnya. Notoatmodjo (1992) mengemukakan bahwa berbicara masalah

sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menyangkut kuantitas dan kualitas, kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia juga menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan kepada dua aspek tersebut. Upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kedua aspek tersebut inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia. Bank Dunia (1990) menkonsepsikan pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah menyangkut pengembangan manusia (*human development*), yaitu menyangkut pengembangan aktivitas-aktivitas dalam bidang-bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, kesempatan kerja, lingkungan hidup yang sehat, pengembangan karier ditempat kerja, dan kehidupan politik yang bebas. Pengertian ini diperluas kembali oleh CIDA, dalam Effendi (1993) dengan mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan manusia, yaitu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia (melalui investasi pada manusia itu sendiri) dan pada pemanfaatan kemampuan itu (melalui penciptaan kerangka keterlibatan manusia) untuk

mendapatkan penghasilan dan perluasan peluang kerja. Peluang kerja yang dimaksud di sini, menurut CIDA, dalam Effendi (1993) ditujukan pada kelompok sasaran untuk mempermudah mereka melibatkan diri dalam sistem sosio-ekonomi di negara itu. Kelompok sasaran termasuk wanita, tuna wisma, penduduk miskin di desa dan kota, penduduk usia muda, masyarakat terpencil, dan lain-lain.

Dalam hubungan ini, Suseno (1995) menjelaskan secara lebih luas konsep pengembangan sumber daya manusia. Dikatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia dapat mencakup peningkatan partisipasi manusia, yaitu peningkatan partisipasi manusia melalui perluasan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan, dan perluasan berusaha. Dengan pengertian ini maka pengembangan sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan keterlibatan manusia dalam proses pengembangan, baik dalam dimensi hak maupun dimensi kewajiban.

Dalam dimensi hak, maka setiap warga masyarakat mempunyai hak-hak pengembangan yang dapat dinikmati berupa kemudahan-kemudahan memperoleh fasilitas kehidupan atau yang berupa barang dan jasa yang diperoleh sebagai kontraprestasi kerja yang dilakukan; sedangkan dalam dimensi kewajiban, setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban turut serta dalam proses pengembangan. Sinungan (1987) menyimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah pemanfaatan potensi yang ada pada kemampuan manusia itu sendiri

dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan dengan tingkat keterampilan yang sesuai dengan isi kerja yang akan mendorong kemajuan setiap usaha yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan pencapaian tujuan usaha bisa terselenggarakan dengan baik, efektif dan efisien.

Dengan demikian, aspek pengembangan SDM yang berhubungan dengan pendidikan dan latihan/keterampilan, Hidayat (1980) mengemukakan bahwa meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang antara lain meliputi pengetahuan dan keterampilan akan menimbulkan inisiatif-inisiatif dan meningkatkan produktifitas. Hampir senada dengan itu, Todaro (1983) mengemukakan bahwa pengetahuan dan keterampilan memungkinkan orang untuk bekerja lebih baik. Dengan bekerja keras, seseorang dapat meningkatkan produktivitasnya, maka akan meningkat pula pendapatan (profit) usaha mereka, sehingga memiliki kemampuan untuk merealisasikan kewajiban sebagai warga negara seperti membayar pajak, retribusi dan kewajiban lainnya yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dari sisi PAD.

b) Pengaruh bantuan modal terhadap penerimaan PAD

Selain pendidikan dan latihan, dalam setiap usaha, modal usaha sangat besar peranannya dalam meningkatkan pendapatan atau keuntungan (profit) usaha. Hal ini ditegaskan oleh Turang, (1995) bahwa diantara sejumlah komponen utama yang menentukan suatu

usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang dengan efektif, salah satunya adalah modal kerja, selain teknologi tepat guna, model manajemen usaha, pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha, ethos kerja, semangat dan disiplin kerja. Artinya bahwa tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang, karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha.

Pada satu sisi, walaupun suatu usaha telah memiliki modal sendiri namun jumlahnya terbatas, maka akan mengalami pula kesulitan untuk mengembangkan usahanya sehingga kurang berpeluang untuk bersaing serta memperoleh pendapatan atau keuntungan yang memadai; dan di sisi lain, bahwa walaupun ada modal yang cukup, namun tidak dikelola secara baik, efisien dan efektif, akan menimbulkan pemborosan bahkan mengalami kerugian dalam berusaha. Dengan demikian pemberian modal kerja (modal untuk berusaha) akan dapat mendorong pengembangan usaha PKL sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya akan memenuhi kewajiban untuk membayar retribusi daerah sebagai salah satu komponen penerimaan PAD.

c) Pengaruh cara-cara mengolah usaha terhadap penerimaan PAD

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa pendidikan dan latihan serta modal usaha belum secara otomatis dapat menjamin suatu usaha mampu meningkatkan profit usahanya tanpa didukung dengan suatu cara-cara atau manajemen pengelolaan usaha yang baik, dalam arti memenuhi suatu tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan usaha tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan secara teoritis bahwa pemberdayaan sektor informal yang berkaitan dengan pengelolaan unsur manusia (pendidikan dan latihan), unsur uang (modal usaha) dan cara-cara berusaha yang baik, baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan atau penghasilan (profit usaha) pedagang kaki lima dan pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di Kota Solok.

2.3. Penelitian Terdahulu

- a. Pada tahun 1996, Afriadi melakukan penelitian mengenai “Sektor Informal Perkotaan di Indonesia” dimana data yang di gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) dalam beberapa terbitan. Data tentang angkatan kerja dan penduduk di ambil dari publikasi hasil sensus penduduk, lembaga ekonomi regional Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, dan lembaga- lembaga lain yang berkaitan dengan masalah penulisan. Dari hasil penelitiannya

- sebagai salah satu negara berkembang, persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor informal cukup tinggi. Kondisi ini juga terjadi untuk peranan sektor informal di perkotaan terhadap penyerapan tenaga kerja
- b. Jurnal Firdausy, Carunia Mulya. (1995). "Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima." Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Tulisan ini membahas dua hal, Pertama model pengembangan sektor informal PKL perkotaan yang diambil dari hasil studi di empat kota (Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya). Model pengembangan ini berupaya untuk mengoptimalkan potensi sosial ekonomi sektor informal PKL dan mengurangi permasalahan yang ditimbulkannya. Kedua, rumusan kebijakan yang harus ditempuh pemerintah agar model pengembangan PKL dapat mencapai tujuan.
- c. Pada tahun 1996, Khairiniyanti melakukan penelitian mengenai "Sektor Informal dalam pembangunan ekonomi Indonesia suatu studi pengembangan sumber daya manusia". Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu, keadaan angkatan kerja dan upah buruh menurut jenis pekerjaan dan kepustakaan dari lembaga-lembaga resmi seperti pusat studi kependudukan Universitas Andalas Padang dan studi kepustakaan yang relevan. Dari hasil yang di dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor informal di Indonesia, di pengaruhi oleh faktor-faktor tingkat pengangguran, rata-rata upah perhari buruh sektor formal

peringkat terbawah dan daya serap faktor formal terhadap angkatan kerja . dari hasil pengujian statistik di dapatkan ketiga faktor tersebut mampu untuk menerangkan variasi dari tenaga kerja sektor informal di Indonesia.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam memecahkan suatu persoalan untuk mendapatkan hasil yang optimal, diperlukan suatu metodologi yang terencana, sistematis, serasi dan saling mendukung satu sama lain, sehingga masalah dapat diselesaikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pada bab ini akan diuraikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemecahan masalah mulai dari awal hingga akhir penelitian, adapun tahap-tahap kegiatan yang dilalui adalah :

3.1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan memakai kuesioner sebagai alat pengumpul data dari lingkungan sebenarnya. (Sekaran, 2000: 251). Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan data diri responden yang akan mengidentifikasikan bagaimana pedagang kaki lima di kota Solok memberikan kontribusinya melalui retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah .

3.2. Data dan Sumber Informasi

Data yang di gunakan sebagai berikut:

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang langsung diperoleh dari sumber asli atau tidak melalui perantara dan secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh melalui survey lapangan selain itu, untuk kelengkapan

data primer dilakukan wawancara serta jawaban responden atas pernyataan-pernyataan dari kuesioner yang disebarkan yang biasa dilakukan oleh peneliti.

2. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh atau dicatat oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi BPS, Bappeda, instansi yang terkait seperti Dinas pasar Kota Solok, laporan-laporan, jurnal-jurnal serta data lainya yang relevan dengan penelitian.

3.3.Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi studi dipilih sesuai dengan tujuan studi. Penelitian memfokuskan pada pedagang kaki lima yang berada di pasar Kota Solok. Alasan dipilihnya sebagai lokasi penelitian karena kota solok merupakan wilayah yang strategis bagi pedagang kaki lima. Selain itu bila dilihat dari jenis usaha, jenis tempat usaha dan waktu operasional PKL, maka karakteristik tersebut cukup dalam mewakili penelitian ini.

Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi, terdapat berbagai macam cara. Salah satunya dengan cara sampling mengingat populasi yang diteliti cukup banyak serta keterbatasan biaya, waktu dan tenaga. Dalam menentukan besarnya sampel peneliti menggunakan pendapat Kracjie dan Harry King. Dengan cara tersebut penulis tidak mempergunakan perhitungan yang rumit. Kracjie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel di dasarkan atas kesalahan 5% jadi sampel yang diperoleh mempunyai tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi.

Data dan informasi diperoleh dengan tiga cara. *Pertama*, survey pedagang kaki lima dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dan kuantitatif permasalahan dan kondisi terkini yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini jumlah keseluruhan populasi di Kota Solok adalah 396 PKL. Bila tingkat kesalahan 5% maka jumlah sampelnya sebanyak 100 PKL.

Sampel diperoleh menggunakan rumus:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Dimana : n adalah jumlah sampel

N adalah jumlah PKL

d adalah derajat kesalahan, dalam penelitian ini derajat kesalahan di ambil sebesar 5% dengan tingkat keyakinan sebesar 95%

Tabel 3.1
Jumlah Populasi dan Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi	396
Sampel	100

Sumber : Data diolah

Kedua, melakukan diskusi kelompok dengan pedagang kaki lima dan pemerintah daerah setempat. Kegiatan ini berfungsi memperkuat validitas data dengan adanya saling cek informasi antar pihak-pihak yang berkepentingan dengan peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima dan peningkatan

penerimaan pendapatan asli daerah.

Ketiga, wawancara mendalam (WM) dilakukan untuk melengkapi data dan informasi permasalahan yang saat ini di hadapi oleh pedagang kaki lima yang tidak terungkap pada survey terkait dengan kebijakan pemerintah dan kerangka berfikir pedagang kaki lima dalam perbaikan kesejahteraan pedagang kaki lima.

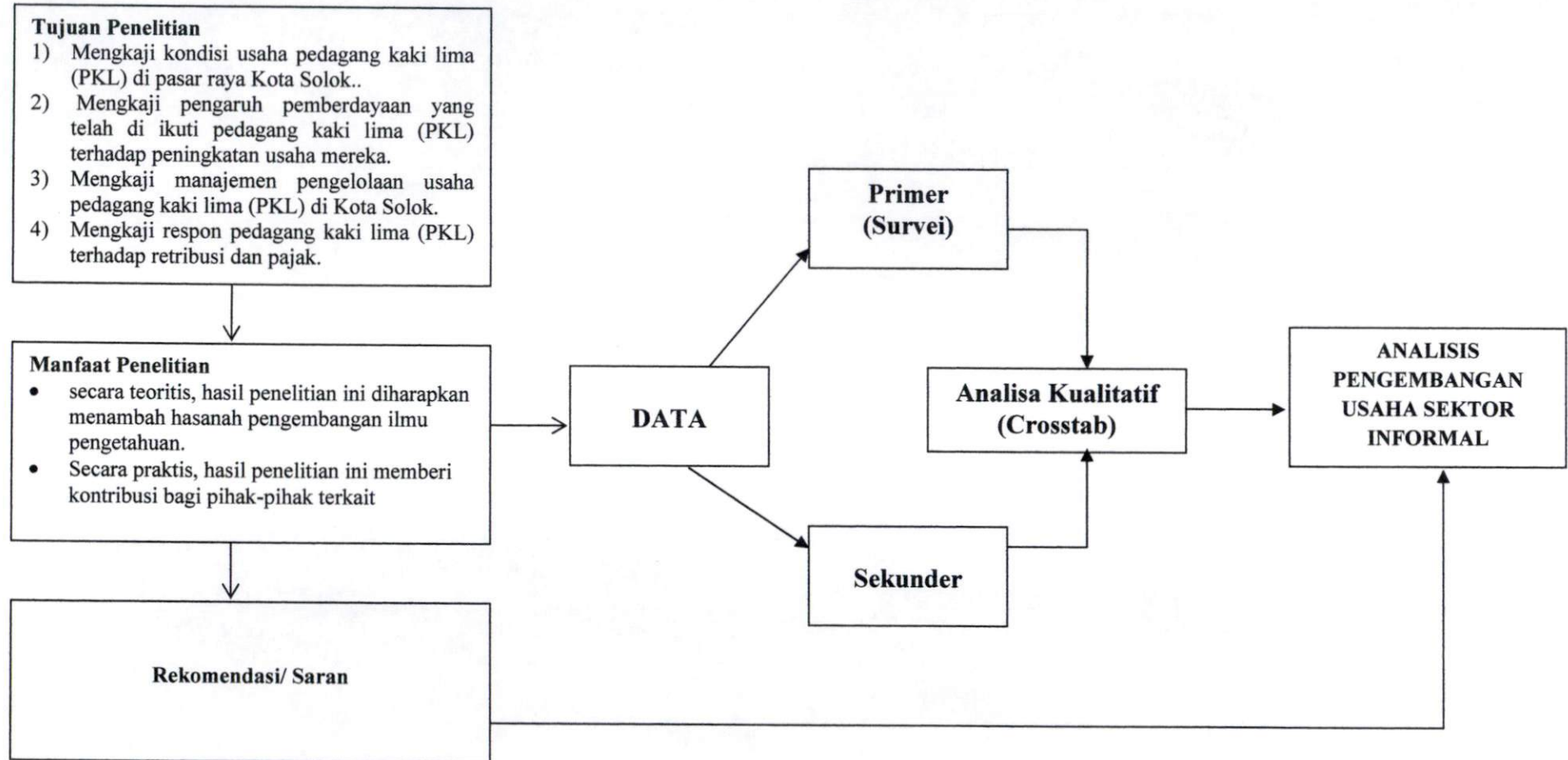
Gabungan ketiga cara pengumpulan data diatas merupakan upaya untuk memperluas dan meningkatkan akurasi informasi dan temuan lapangan agar lebih baik dan terpercaya.

3.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data sekunder dan data primer (survey lapangan) dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science* (SPSS). Analisis kualitatif dengan menggunakan crosstabs (tabulasi silang).

Analisis ini digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi pedagang kaki lima dalam meningkatkan usaha mereka, mengkaji kondisi terkini pedagang kaki lima, serta menganalisis kebijakan pemerintah menguntungkan atau merugikan pada pedagang kaki lima. Kajian merupakan basis yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang pas dan membuat rekomendasi yang relevan bagi perbaikan kesejahteraan pedagang kaki lima.

3.5. Kerangka atau Alur Pemikiran



BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

4.1 Luas Wilayah Dan Batas Wilayah

Secara geografis kota solok berada pada posisi 0°32' LS sampai 1°45'LS dan 100°32'BT sampai 101°41'BT, terdiri dari daerah datar, bergelombang, curam, sangat curam dan berbukit dengan ketinggian rata-rata mencapai 390 meter di atas permukaan laut. Kota Solok terbentang pada jalur strtegis lintas Sumatra Barat bagian Timur yang menghubungkan Provinsi Jambi, Sumatra Utara dengan ibukota Provinsi Sumatra Barat, Kota Padang. Berajak kira-kira 64 Km dari Kota Padang dengan waktu tempuh 75 menit. Secara administrasi wilayah Kota Solok berbatasan langsung dengan nagari-nagari di Kabupaten Solok, yaitu :

- Sebelah Barat** Nagari Selayo, Kota Padang
- Sebelah Timur** Nagari Saok Laweh, Guguk Sarai dan Nagari Gaung
- Sebelah Utara** Nagari Tanjung Bingkung dan Nagari Kuncir
- Sebelah Selatan** Nagari Gaung, panyangkalan, Koto Baru dan Nagari Selayo

Secara administrative, Kota solok terdiri dari 2 (dua) kecamatan yakni Kecamatan Lubuk Sikarah dengan luas wilayah 3.500 Ha yang terdiri atas 7 (tujuh) kelurahan dan Kecamatan Tanjung Harapan dengan luas wilayah 2.264 Ha yang terdiri atas 6 (enam) kelurahan.

4.2 Iklim dan Curah Hujan

Kota Solok mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh angin Barat. Selama tahun 2008 di wilayah kota solok telah terjadi sebanyak 116 hari hujan dengan curah hujan rata-rata 184,31mm. Tingkat curah hujan tertinggi pada umumnya terjadi pada bulan November dan terendah pada bulan Juni. Temperatur udara rata-rata terendah mencapai 26,1°C dan temperature udara tertinggi mencapai 28,9°C.

4.3 Struktur Tanah dan Hidrologi

Berdasarkan jenis tanah yang ada di Kota Solok, sebagian besar di dominasi oleh jenis tanah kompleks podsolik merah kuning, podsolik coklat dan latosol (2.006 Ha atau 34,80%), alluvial 1.248 Ha (21,65%), brown forest soil 1.190 Ha (20,64%), padsolik merah kuning 935 Ha (16,22%) dan latosol 385 Ha (6,68%).

Kota Solok di lewati oleh 3 aliran sungai yaitu batang Lembang, Batang gawan, dan Batang Binguang. Sungai Batang Lembang mencakup Wilayah Kota dan Kabupaten Solok yang membelah Kota solok, dimana terdapat beberapa titik longsor dan terkadang meluap pada waktu hujan sehingga menimbulkan genangan pada beberapa kawasan.

4.4. Penggunaan Lahan

Kota Solok yang memiliki luas 5.764 Ha, baru sebagian kecil yang merupakan lahan terbangun yaitu seluas 1.089.08 Ha (18,89 %). Lahan terbangun tersebut sebagian besar untuk penggunaan perumahan (13,67 %) lahan seluas 4.674,92 Ha (81,11 %) masih berupa hutan, sawah, perkebunan dan lahan terbuka

lainya. Hutan yang terdapat di Kota Solok yaitu seluas 1.359,93 Ha (23,59%), dimana 664 Ha (48,83%) hutan tersebut berupa kawasan lindung. Walaupun termasuk daerah perkotaan, luas areal sawah di Kota Solok mencapai 21,65% dari luas wilayah Kota Solok.

4.5 Karakteristik Sosio Demografis

Hasil registrasi penduduk Kota Solok tahun 2008 tercatat sebanyak 59.172 jiwa, terdiri atas 28.989 laki-laki dan 30.173 perempuan. Dengan sex ratio sebesar 0.96. ini berarti setiap 1.000 perempuan berbanding 960 laki-laki. Dengan luas wilayah 5.764 Km², kepadatan penduduk Kota Solok adalah sebanyak 1.026 jiwa/Km². Kecamatan Tanjung Harapan adalah kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 1.223 jiwa/Km².

Tabel 4.1
Kondisi Penduduk Kota Solok Tahun 2008

Kecamatan	Luas(Km ²)	Jumlah Penduduk(jiwa)	Kepadatan (jiwa/Km ²)
Lubuk Sikarah	35.00	31.466	899
Tanjung Harapan	22.64	27.696	1.223
Kota Solok	57.64	59.162	1.026

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2008/2009

Dari komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Solok dapat dilihat bahwa penduduk perempuan lebih dominan pada usia produktif di bandingkan dengan laki-laki. Keadaan itu tentunya akan membentuk pola kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang banyak memberikan peran lebih kepada kaum perempuan. Kenyataan ini merupakan konsekuensi logis akibat besarnya kecenderungan penduduk laki-laki dewasa untuk merantau dalam mencari

pekerjaan yang lebih baik di daerah lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Kota Solok Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2008

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total (jiwa)	Sex ratio
0 – 4	3.537	3.404	6.941	104
5 – 9	3.306	3.335	6.641	99
10 – 14	3.369	3.319	6.688	102
15 – 19	3.577	3.972	7.549	90
20 – 24	2.431	2.541	4.972	96
25 – 29	2.284	2.542	4.826	90
30 – 34	2.040	2.162	4.202	94
35 – 39	2.141	2.258	4.399	95
40 – 44	1.878	1.855	3.733	101
45 – 49	1.535	1.331	2.866	114
50 – 54	813	832	1.645	97
55 – 59	650	690	1.340	95
60 – 64	550	634	1.184	87
65 – 69	356	474	830	75
70 – 74	278	363	641	77
75+	243	462	705	53
Total 2008	28.988	30.174	59.162	96.00

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2008/2009

4.6 Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja di definisikan sebagai penduduk yang berusia 10 tahun dan lebih, terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi di ukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja yakni yang bekerja atau mencari kerja, yang dikenal dengan istilah Angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. Proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini dapat

pula mencerminkan struktur perekonomian suatu wilayah. Sebagian besar penduduk Kota Solok yang bekerja pada tahun 2008, memiliki lapangan pekerjaan utama sebagai tenaga perdagangan, di ikuti oleh sektor jasa-jasa dan sektor transportasi

Tabel 4.3
Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut
Lapangan Pekerjaan tahun 2008

No	Lapangan Usaha	Penduduk (%)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	5,68	6,62	12,30
2	Pertambangan/penggalan	1,63	0,00	1,63
3	Industri	3,33	1,73	5,06
4	Listrik, Gas dan Air minum	0,36	0,12	0,48
5	Konstruksi	7,03	0,00	7,03
6	Transportasi & Komunikasi	11,69	1,58	13,27
7	Perdagangan	17,38	15,53	32,91
8	Bank dan Lembaga Keuangan	0,80	1,05	1,85
9	Jasa - jasa	12,93	12,54	25,47
Jumlah		60,83	39,17	100,00

Sumber : Kota Solok Dalam Angka Tahun 2008/2009

Dilihat dari tabel di atas dapat di lihat bahwa pola penyerapan tenaga kerja menurut sektor hampir sama dengan pola penyerapan menurut jenis kelamin. Perbedaanya adalah bahwa pola penyerapan tenaga kerja laki-laki terlihat tersebar hampir sama di semua sektor. Di sini dapat di lihat sektor perdagangan memiliki jumlah yang tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan.

4.7 Keuangan Daerah

Keuangan daerah tidak saja berperan sebagai salah satu faktor pendukung terselenggaranya pembangunan daerah yang baik namun juga merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengurus daerahnya. Kota Solok

memiliki sumber keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

4.8 Gambaran Kondisi PKL kota Solok

Sesuai dengan kebijakan dan fungsi utama kota solok yang mengarah kepada visi dan misi kota solok dimana salah satu untuk mencapai visi kota yaitu mendorong dan memfasilitasi tumbuh dan kembangnya perekonomian masyarakat kota solok melalui:

1. Perdagangan dan jasa

- a. Menjadikan kota solok sebagai pusat perdagangnan untuk profinsi Sumatra Barat bahagian selatan dari perdagangan lokal untuk itu perlu ditunjang dengan system perdangan yang mampu menjalankan fungsi perdagangan besar dan sebagai pasar induk.
- b. Mengembangkan fungsi perdangan besar dan pembinaan pengusaha menengah dan kecil melalui pembinaan manajemen
- c. Menjadikan koperasi dan usaha kecil serta usaha menengah sebagai badan usaha yang mandiri dan mempunyai daya saing tinggi sehingga secara bertahap berperan sebagai pilar perekonomian daerah
- d. Meningkatkan kawasan usaha dan peranan koperasi / PKL dengan menyediakan tempat berkonsultasi.

2. Kawasan pusat kota

Kawasan pusat kota mempunyai karakteris sebagai pusat perdagangan retail jasa masyarakat kota, berdasarkan prinsip "therhold Population" penduduk merupakan salah satu faktor penting dan yang sangat mempengaruhi sekali

terhadap penempatan suatu pusat pelayanan (pasar) karena pasar yang dibangun berguna untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang berada pada kawasan atau wilayah.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penggerak utama kegiatan perekonomian dan pembangunan di kota solok yang perkembangannya hingga saat ini cukup menggembirakan hal ini didukung oleh letak kota solok yang strategis karena berada dipersimpangan lalu - lintas perekonomian Sumatra Barat sehingga sektor ini dimungkinkan untuk dikembangkan sebagai sektor utama penyumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Usaha perdagangan kota solok didominasi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Aktifitas sebagian besar pedagang di kota solok terkonsentrasi di pasar raya solok (67,08%) dan sisanya tersebar di 13 kelurahan yang ada di kota solok. Terutama disepanjang jalan utama. Pasar raya solok terdiri dari 189 pertokoan dan kios 1990 buah. Bila dilihat dari aktifitas pasar raya solok mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pedagang yang mempunyai petak/ kios (PKL) serta variasi jumlah usaha lainnya. Akan tetapi peningkatan aktivitas berkembang diluar konsep perkembangan pasar. Atau dalam kata lain perkembangan tersebut terlambat diantisipasi termasuk peningkatan aktifitas daerah sekitarnya hal ini mengakibatkan pengembangan pasar yang dikelola oleh pemerintah kota solok berkembang tanpa didukung oleh peningkatan sarana pendukung lainnya seperti tempat parkir kendaraan.

Jika dilihat dari pemanfaatan petak toko dipasar raya solok terbagi dua kelompok yaitu pedagang hak pakai langsung memanfaatkan fasilitas langsung

fasilitas yang telah disediakan dan kelompok pengontrak. (Penyewa) yaitu diperkirakan $\pm 58\%$ sedangkan yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak sewa hanya sebesar $\pm 42\%$

Sedangkan jika dilihat dari legalitas dari pemegang hak sewa (pakai) dalam mengontrak hak pakainya kepada pihak ketiga (pengontarak) diketahui banyak yang ilegal (Tidak diketahui Pemerintah Kota Solok dengan Dinas Pasar Solok) dan diperkirakan sebesar 95% dan bersifat legal hanya 5%.

Tabel 4.4
Keadaan Toko, kios, PKL, dan Peti Dikantor Pengelolaan pasar

No.	Jenis Penempatan	Jumlah
1	Pertokoan	189
2	Kios	1190
3	PKL Tetap	125
4	PKL Tidak tetap	151
5	Peti	368

Sumber: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Solok

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dimasa akan datang pemerintah kota solok berupaya mengarahkan pengelolaan pasar kepada bentuk pasar modren namun penataan pasar tradisional yang sudah ada tetap dilakukan untuk itu perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan pasar modern di kota solok.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Bagian ini membahas hasil penelitian yang telah dilakukan seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kondisi usaha pedagang kaki lima (PKL) di pasar raya Kota Solok, mengkaji pengaruh pemberdayaan yang telah diikuti pedagang kaki lima (PKL) terhadap peningkatan usaha mereka, mengkaji manajemen pengelolaan usaha pedagang kaki lima (PKL) serta mengkaji respon pedagang kaki lima (PKL) terhadap retribusi dan pajak di Kota Solok. Yang menjadi objek penelitian adalah pedagang kaki lima yang berlokasi di pasar Kota Solok. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 396 pedagang kaki lima. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang pedagang kaki lima. Data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data sekunder dan data primer (survey lapangan) serta terhadap persoalan – persoalan yang melibatkan pedagang kaki lima dan kelembagaan ekonomi yang ada.

5.1.1 Karakteristik Responden

Tabel 5.1
Karakteristik Responden berdasarkan Pengelompokan Jenis Usaha

Pengelompokan Jenis Usaha	%
Jenis Usaha Makanan	55
Jenis Usaha Bukan Makanan	45
Jumlah	100

Sumber : Data Lapangan yang diolah

Pengelompokan jenis usaha di pasar Kota Solok terbagi 2 bagian, yaitu jenis usaha makanan dan jenis usaha non makanan. Jenis usaha makanan berupa usaha penjualan beras, buah – buahan, bumbu masak, kelapa, kelontong, ikan kering, makanan ringan, minuman ringan, sayuran dan lain – lain. Sedangkan jenis usaha non makanan berupa penjualan aksesoris, jilbab, kaset CD, kosmetik, mainan, buku/majalah/ koran, pakaian, pecah belah, sepatu/sandal, dll.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada 100 orang responden yang merupakan pedagang kaki lima di pasar Kota Solok, 55% pedagang kaki lima di pasar Kota Solok memiliki jenis usaha makanan dan 45% pedagang kaki lima yang ada di pasar Kota Solok memiliki jenis usaha non makanan. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa rata – rata pedagang kaki lima yang ada di Pasar Kota Solok memiliki jenis usaha makanan.

Tabel 5.2
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan
Pengelompokan Jenis Usaha

Jenis Kelamin	Pengelompokan Jenis Usaha		Total
	Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
	%	%	%
Laki – Laki	51.2	48.8	43
Perempuan	57.9	42.1	57
Jumlah	55	45	100

Sumber : Data Lapangan yangdiolah

Berdasarkan hasil survey lapangan pada tabel 5.2, dari 57 orang PKL yang berjenis kelamin perempuan terdapat 57.9% diantaranya memiliki jenis usaha makanan dan 42.1% PKL memiliki jenis usaha non makanan. Sedangkan dari 43 orang PKL yang berjenis kelamin laki – laki terdapat 51.2% PKL yang memiliki jenis usaha makanan dan 48.8% PKL memiliki jenis usaha non makanan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa PKL perempuan lebih banyak (57%) dibandingkan PKL laki – laki dan sebagian besar PKL di Pasar Kota Solok memiliki jenis usaha makanan (55%).

Tabel 5.3
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Umur

Jenis Kelamin	Umur		Total
	< 36 tahun	> 36 tahun	
	%	%	%
Laki – Laki	37.2	62.8	43
Perempuan	50.9	49.1	57
Jumlah	45	55	100

Sumber : Data Lapangan yang diolah

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan pada tabel 5.3, diperoleh gambaran bahwa, dari 43 PKL yang berjenis kelamin laki – laki sebagian besar berumur diatas 36 tahun yaitu 62.8% dan sisanya 37.2% berumur kurang dari 36 tahun. Dan dari 57 PKL yang berjenis kelamin perempuan, sebagian besar berumur kurang dari 36 tahun sebanyak 50.9% sedangkan yang berumur diatas 36 tahun sebanyak 49.1%. Dari uraian tersebut diketahui PKL yang dominan di Kota Solok adalah perempuan yang beumur dibawah 36 tahun.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 100 orang PKL yang diteliti, sebagian besar PKL di pasar Kota Solok berumur diatas 36 tahun dengan jenis kelamin laki-laki.

Tabel 5.4
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dengan Status Perkawinan

Jenis Kelamin	Status Perkawinan				Total %
	Kawin	Belum Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	
	%	%	%	%	
Laki – Laki	79.1	14	4.7	2.3	43
Perempuan	77.2	12.3	5.3	5.3	57
Jumlah	78	13	50	4	100

Sumber : Data lapangan yang diolah

Berdasarkan hasil data lapangan yang diolah seperti pada tabel 5.4, dari 43 PKL yang berjenis kelamin laki – laki sebagian besar berstatus kawin yaitu 79.1%, yang belum kawin 14%, yang cerai hidup 4.7% dan 2,3% cerai mati. Sedangkan dari 57 PKL yang berjenis kelamin perempuan sebagian besar juga bertatus kawin yaitu sebesar 77.2%, belum kawin 12.3%, 5.3% cerai hidup dan cerai mati.

Dari penjelasan diketahui bahwa dari 100 orang PKL yang diteliti, sebagian besar PKL di pasar Kota Solok berstatus kawin/ sudah menikah (78%). Dari informasi ini menjelaskan bahwa pada umumnya pedagang tersebut melakukan aktifitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui usaha dagang yang dilakukan.

Tabel 5.5
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin
dengan Pendidikan

Jenis Kelamin	Pendidikan					Total %
	Tidak Sklh	SD	SLTP	SLTA	Akade mi	
	%	%	%	%	%	
Laki – Laki	2.3	14	25.6	58.1	0	43
Perempuan	7.0	17.5	15.8	57.9	1.8	57
Jumlah	5	16	20	58	1	100

Sumber : Data lapangan yang diolah

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada tabel 5.5, dari 43 PKL yang berjenis kelamin laki – laki mayoritas (58.1%) berpendidikan SLTA, yang berpendidikan SLTP 25.6%, yang berpendidikan SD 14% dan yang tidak sekolah 2.3%. Dan dari 57 orang PKL yang berjenis kelamin perempuan, mayoritas (57.9%) berpendidikan SLTA, yang berpendidikan SD 17,5%, yang berpendidikan SLTP 15.8% dan yang tidak sekolah 7%.

Informasi ini menunjukkan bahwa pada umumnya sebagian besar pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Solok (58%) berpendidikan SLTA. Namun fakta menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya yang dimiliki pedagang khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran. Disamping itu adalah rendahnya tingkat kompetensi kewirausahaan. Rendahnya tingkat pendidikan para pedagang tersebut tidak diimbangi dengan upaya – upaya peningkatan kemampuan (*capacity building*) baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun studi banding secara terprogram.

Tabel 5.6
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin
dengan Tahun Mulai Usaha

Jenis Kelamin	Tahun Mulai Usaha		Total
	< tahun 1999	> tahun 1999	
	%	%	
Laki – Laki	48.8	51.2	43
Perempuan	36.8	63.2	57
Jumlah	42	58	100

Sumber : Data lapangan yang diolah

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada tabel 5.6, dari 43 PKL yang berjenis kelamin laki – laki mayoritas 51.2% memulai usahanya setelah tahun 1999 sedangkan yang memulai usahanya sebelum tahun 1999 adalah sebanyak 48.8%. Dan dari 57 orang PKL yang berjenis kelamin perempuan, mayoritas (63.2%) PKL memulai usahanya setelah tahun 1999 sedangkan yang memulai usaha sebelum tahun 1999 sebanyak 36,8%.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa rata – rata dari 100 orang PKL yang ada di kota Solok (58%) memulai usahanya diatas tahun 1999. Pada umumnya para pedagang lebih fokus pada pengalaman menjalankan usahanya Sedangkan

upaya – upaya untuk meningkatkan kemampuan dari para pedagang belum merupakan prioritas.

Tabel 5.7
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin
dengan Keuntungan yang diperoleh/ omset per bulan

Jenis Kelamin	Keuntungan / omset per bulan		Total
	< Rp. 2.500.000	> Rp. 2.500.000	
	%	%	%
Laki – Laki	46.5	53.5	43
Perempuan	38.6	61.4	57
Jumlah	42	58	100

Sumber : Data lapangan yang diolah

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pada tabel 5.7, dari 43 PKL yang berjenis kelamin laki – laki, mayoritas 53.52% memiliki omset perbulan diatas Rp. 2.500.000 sedangkan PKL yang memiliki omset perbulan kurang dari Rp. 2.500.000 sebesar 46.5%. Dan dari 57 orang PKL yang berjenis kelamin perempuan, mayoritas (61.4%) PKL memiliki omset perbulan diatas Rp. 2.500.000 sedangkan sisanya 38.6% PKL memiliki omset perbulan dibawah Rp. 2.500.000.

Dari uraian tersebut diketahui bahwa rata – rata dari 100 orang PKL yang ada di kota Solok (58%) memiliki omset per bulan cukup tinggi yaitu diatas Rp. 2.500.000.

5.1.2 Kondisi Usaha

Tabel 5.8
Kondisi usaha PKL dilihat dari perkembangan omset usaha dalam setahun berdasarkan pengelompokkan jenis usaha dalam setahun terakhir

Kategori	Pengelompokkan jenis usaha		Total
	Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
	%	%	%
Menurun	20	17.8	19
Stabil	72.7	60	67
Meningkat	7.3	22.2	14
Jumlah	100	100	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Dilihat dari segi kondisi usaha PKL, berdasarkan hasil penyebaran kuesioner terhadap 100 orang PKL yang ada di pasar Kota Solok, mayoritas (67%) PKL memiliki perkembangan omset yang stabil tiap tahunnya dan 14% PKL memiliki perkembangan omset yang meningkat tiap tahunnya. Hanya 19% PKL yang memiliki perkembangan omset yang menurun setiap tahunnya.

Dilihat dari segi kelompok jenis usaha, dari 55 PKL yang memiliki jenis usaha makanan 72,7% diantaranya memiliki perkembangan omset yang stabil tiap tahunnya, 20% PKL memiliki perkembangan omset yang menurun setiap tahunnya dan hanya 7,3% PKL yang memiliki perkembangan omset yang meningkat setiap tahunnya.

Sedangkan dari 45 orang PKL yang memiliki jenis usaha non makanan. 60% diantaranya memiliki perkembangan omset yang stabil setiap bulannya, 22.2% PKL menyatakan memiliki perkembangan omset yang meningkat setiap tahunnya dan 17.8% PKL menyatakan memiliki perkembangan omset yang menurun setiap tahunnya.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan peningkatan omset usaha dalam setahun terakhir lebih banyak (22.2%) terdapat pada PKL yang memiliki jenis usaha non makanan sedangkan untuk PKL yang memiliki jenis usaha makanan 20% diantaranya mengalami penurunan omset penjualan dalam setahun terakhir ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Kondisi usaha PKL dilihat dari penyebab menurunnya kondisi usaha berdasarkan pengelompokkan jenis usaha

Kondisi Usaha	Kategori	Pengelompokkan jenis usaha		Total
		Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
Penyebab Kondisi Usaha Menurun	Permintaan berkurang Ya Tidak	20 0	17.8 0	19 0
	Pesaing semakin banyak Ya Tidak	20 0	17.8 0	19 0
	Biaya tenaga kerja semakin tinggi Ya Tidak	9.1 10.9	4.4 13.3	7 12
	Biaya modal relatif tinggi Ya Tidak	14.5 5.5	17.8 0	2 3
	SDM berkualitas rendah Ya Tidak	5.5 14.5	4.4 13.3	5 14
	Pajak dan pungutan tinggi Ya Tidak	0 20	0 17.8	0 19
	Biaya tidak resmi banyak Ya Tidak	0 20	0 17.8	0 19
	Perekonomian membaik Ya Tidak	0 20	0 17.8	0 19
	Transportasi semakin sulit Ya Tidak	0 20	0 17.8	0 19
	Harga jual produk turun Ya Tidak	5.5 14.5	2.2 15.6	4 15
	Jumlah	55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Berdasarkan jawaban responden, dari 55 orang responden yang menyatakan yang memiliki jenis usaha makanan, 20% diantaranya mengalami penurunan omset setiap tahunnya disebabkan karena permintaan konsumen kurang dan karena jumlah pesaing semakin banyak. 9,1% PKL menyatakan bahwa turunnya omset penjualan disebabkan karena biaya tenaga kerja semakin tinggi, 14.5% PKL menyatakan turunnya omset penjualan disebabkan karena biaya modal relatif tinggi dan 5,5% PKL menyatakan turunnya omset penjualan disebabkan karena SDM berkualitas rendah dan harga jual produk yang semakin turun.

Sedangkan dari 45 PKL yang memiliki jenis usaha non makanan 17.8% diantaranya menyatakan bahwa turunnya omset penjualan setiap tahunnya disebabkan karena karena permintaan kurang, karena jumlah pesaing semakin banyak dan karena biaya modal relatif tinggi. Selain itu 4.4% PKL menyatakan bahwa turunnya omset penjualan disebabkan karena biaya tenaga kerja semakin tinggi dan SDM yang berkualitas rendah dan 2.2% PKL menyatakan turunnya omset penjualan disebabkan karena harga jual produk yang semakin turun.

Tabel 5.10
Kondisi usaha PKL dilihat dari penyebab meningkatnya kondisi usaha berdasarkan
pengelompokkan jenis usaha

Kategori	Pengelompokkan jenis usaha		Total
	Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
Perekonomian meningkat			
Ya	0	0	0
Tidak	7.3	22.2	14
Persaingan berkurang			
Ya	0	0	0
Tidak	7.3	22.2	14
Transportasi semakin lancar			
Ya	0	0	0
Tidak	7.3	22.2	14
Komunikasi semakin lancar			
Ya	5.5	11.1	8
Tidak	1.8	11.1	6
Harga jual produk naik			
Ya	0	0	0
Tidak	7.3	22.2	14
Kebijakan pemerintah yang mendukung			
Ya	0	0	0
Tidak	7.3	22.2	14
Inovasi dan diversifikasi produk			
Ya	1.8	8.9	5
Tidak	5.5	13.3	9
Jumlah	55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Untuk 55 PKL yang memiliki jenis usaha makanan, hanya 7.3% diantaranya yang mengalami peningkatan omset penjualan dalam setahun terakhir ini. 5.5% diantaranya mengatakan bahwa peningkatan mengalami peningkatan omset tiap tahunnya, karena adanya komunikasi yang lancar serta 1.8% disebabkan karena adanya inovasi dan divesifikasi produk. Sedangkan untuk PKL yang memiliki jenis usaha non makanan dari 45 orang PKL 22.2 % diantaranya menyatakan menyatakan usaha yang dijalannya mengalami peningkatan omset penjualan dalam setahun terakhir ini. 11.1% diantaranya

mengatakan peningkatan omset penjualan disebabkan karena adanya komunikasi lancar dan 8.9% disebabkan karena adanya inovasi dan diversifikasi produk.

Dari uraian tersebut diatas, dari segi kondisi usaha yang dimiliki PKL, baik PKL yang memiliki jenis usaha makanan maupun PKL yang memiliki jenis usaha non makanan, masih banyak yang mengalami penurunan omset penjualan dalam setahun terakhir ini. Sebagian besar penurunannya omset penjualan disebabkan karena permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan berkurang, selain itu juga disebabkan karena semakin banyaknya pesaing. Kurangnya permintaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan dan semakin banyaknya jumlah pesaing sangat mempengaruhi jumlah omset yang diterima oleh PKL. Hal ini dapat disebabkan karena banyaknya bermunculan pedagang – pedagang baru yang lebih mampu menawarkan suatu barang produk baru yang lebih inovatif dan bervariasi, sehingga konsumen dapat menarik minat konsumen. Untuk itu agar jumlah permintaan konsumen dapat lebih meningkat, para pedagang harus lebih memiliki inovasi dan diversifikasi produk yang baik.

Sulitnya memperoleh lapangan kerja saat ini, merupakan salah satu penyebab jumlah pesaing yang semakin banyak karena semakin banyaknya masyarakat yang membuka lapangan kerja sendiri yang lebih memiliki inovasi baru dalam menawarkan produk. Sehingga pedagang yang telah lebih dulu membuka lapangan usaha merasa tersaingi.

5.1.3 Kebutuhan Pembiayaan Investasi

Tabel 5.11
Kebutuhan Pembiayaan Investasi berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Jenis Kepemilikan Tempat Usaha	Pengelompokkan jenis usaha		Total
	Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
	%	%	%
Kontrakan	49.1	46.7	48
Punya Sendiri	50.9	53.3	52
Jumlah	55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Kepemilikan tempat usaha bagi pedagang kaki lima di Kota Solok dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu milik sendiri dan mengontrak. Dari hasil survey lapangan yang dilakukan pada tabel 5.11, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar PKL yang ada di Pasar Raya Kota Solok memiliki tempat usaha sendiri. Dari 55 orang PKL yang memiliki jenis usaha makanan 50.9% diantaranya memiliki tempat usaha sendiri dan 49.1% PKL memiliki tempat usaha dengan mengontrak. Sedangkan dari 45 orang PKL yang memiliki jenis usaha non makanan 53.3% diantaranya memiliki tempat usaha sendiri dan 46.7% memiliki tempat usaha dengan mengontrak.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebagai besar pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Solok memiliki tempat usaha sendiri. Kepemilikan tempat usaha dapat mempengaruhi pedagang, apakah dengan status kepemilikan tempat usaha, para pedagang memerlukan pembiayaan investasi atau tidak. Berdasarkan hasil survey lapangan, dari 100 PKL yang diteliti terdapat 38 PKL membutuhkan pembiayaan investasi. Diantaranya 30.9% PKL yang memiliki

jenis usaha makanan dan 46.7% PKL yang memiliki jenis usaha non makanan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.12
Kebutuhan Pembiayaan Investasi berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Kebutuhan Pembiayaan Investasi	Kategori		Pengelompokan jenis usaha		Total
			Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
			%	%	
Mendapatkan pembiayaan investasi	Ya		30.9	46.7	38
	Tidak		69.1	53.3	62
Jika mendapatkan pembiayaan investasi, bagaimana cara mendapatkannya ?	Kredit perbankan	Tidak Mendapatkan pembiayaan investasi	69.1	53.3	62
		Ya	21.8	33.3	27
		Tidak	5	13.3	11
	Pegadaian	Tidak Mendapatkan pembiayaan investasi	69.1	53.3	62
		Ya	0	0	0
		Tidak	30.9	46.7	38
	Koperasi	Tidak Mendapatkan pembiayaan investasi	69.1	53.3	62
		Ya	5.5	2.2	4
		Tidak	25.5	44.4	34
	BMT	Tidak Mendapatkan pembiayaan investasi	69.1	53.3	62
		Ya	0	0	0
		Tidak	30.9	46.7	38
	Rentenir	Tidak Mendapatkan pembiayaan investasi	69.1	53.5	62
		Ya	3.6	8.9	6
		Tidak	27.3	37.8	32
	Teman/ Sdr	Tidak Mendapatkan pembiayaan investasi	69.1	53.3	62
		Ya	0	0	0
		Tidak	30.9	46.7	38
Jumlah			55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Dari hasil survey lapangan yang kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS 15 for window , dapat dirangkum seperti pada tabel 5.12, dari tabel

tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 30.9% PKL yang memiliki jenis usaha makanan, 21.8% PKL diantaranya memperoleh pembiayaan investasi melalui kredit bank, 5.5% PKL memperoleh pembiayaan investasi melalui koperasi dan 3.6% PKL memperoleh pembiayaan investasi melalui rentenir. Sedangkan dari 46.7% PKL yang memiliki jenis usaha non makanan, 33.3% PKL memperoleh pembiayaan investasi melalui kredit bank, 2.2% PKL memperoleh pembiayaan investasi melalui koperasi dan 8.9% memperoleh pembiayaan investasi melalui rentenir.

Meskipun sebagian besar PKL memperoleh pembiayaan investasi dari kredit bank ataupun koperasi, namun masih ada yang memperoleh pembiayaan investasi dari rentenir 6%, dengan alasan prosedur peminjaman lebih mudah, pelayanan lebih mudah, bunga yang ditawarkan cukup menarik, adanya system bagi hasil dan angsuran kredit yang berjumlah kecil. Dari 6% PKL yang memperoleh pembiayaan investasi dari rentenir, 3.6% diantaranya PKL yang memiliki jenis usaha makanan, dan 8.9% diantaranya memiliki jenis usaha non makanan. Sebagian besar PKL yang memperoleh pembiayaan investasi dari investasi non bank, mengatakan bahwa perolehan pembiayaan investasi dari investasi non bank seperti rentenir memiliki prosedur yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari tabel hasil survey lapangan berikut ini :

Tabel 5.13
Alasan PKL memperoleh pembiayaan investasi non bank
berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Kebutuhan Pembiayaan Investasi	Kategori	Pengelompokkan jenis usaha		Total
		Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
		%	%	%
Alasan mendapatkan pembiayaan dari investasi non bank	Prosedur mudah	100	88.9	95
	Pelayanan mudah	92.7	62.2	79
	Bunga menarik	60	66.7	63
	Sistem Bagi Hasil	45.5	48.9	47
	Kredit berjumlah kecil	29.1	46.7	37
	Tidak perlu agunan	49.1	55.6	52
	Jumlah	55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Dari tabel 5.13, diketahui dari 3.9% PKL yang memiliki jenis usaha makanan, 100% menyatakan perolehan investasi melalui investasi non bank karena prosedurnya lebih mudah, 92.7% PKL menyatakan karena pelayanan lebih mudah, 60% menyatakan karena bunga yang diberikan lebih kecil/ menarik, 45.5% menyatakan dengan perolehan investasi non bank memiliki system bagi hasil, 49.1% PKL menyatakan perolehan investasi non bank tidak memerlukan agunan dan 29.1% PKL menyatakan dengan memperoleh investasi non bank jumlah angsuran kredit kecil. Sedangkan untuk PKL yang memiliki jenis usaha non makanan, 88.9% diantaranya mengatakan perolehan investasi non bank memiliki prosedur yang mudah untuk diikuti, 62.2% PKL menyatakan karena pelayanan lebih mudah, 66.7% menyatakan karena bunga yang diberikan lebih kecil/ menarik, 48.9% menyatakan dengan perolehan investasi non bank memiliki system bagi hasil, 55.6% PKL menyatakan perolehan investasi non bank tidak memerlukan agunan dan 46.7% PKL menyatakan dengan memperoleh investasi non bank jumlah angsuran kredit kecil

Tabel 5.14
Penggunaan pembiayaan investasi yang diperoleh
berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Kebutuhan Pembiayaan Investasi	Kategori	Pengelompokkan jenis usaha		Total
		Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
		%	%	%
Pembiayaan investasi yang diperoleh, digunakan untuk	Meningkatkan skala usaha	12.7	24.4	18
	Buka cabang di tempat lain	9.1	26.7	17
	Membeli bahan baku	16.4	20	18
	Membeli mesin – mesin	23.6	40	31
	Menambah tenaga kerja	16.4	35.6	25
	Jumlah	55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Dari hasil survey lapangan, seperti yang terangkum pada tabel 5.14, dapat dijelaskan diantara 30.9% PKL yang memperoleh pembiayaan investasi baik yang berasal dari bank maupun non bank, untuk PKL yang memiliki jenis usaha makanan pada umumnya digunakan untuk membeli mesing – mesin baru (23.6%). Selain itu juga digunakan untuk untuk membeli bahan baku (16.4%) dan menambah tenaga kerja (16.4%). Sedangkan untuk PKL yang memiliki jenis usaha non makanan, pada umumnya digunakan untuk menambah tenaga kerja (35.6%) dan membeli mesin – mesin (40%)

Dengan adanya mesin – mesin baru dapat mempercepat proses dalam memproduksi suatu barang/produk. Peran teknologi dalam peningkatan produktivitas sangatlah besar. Namun penggunaan teknologi konvensional yang saat ini banyak digunakan oleh pengusaha kecil memberikan kelemahan diantaranya rendahnya produktifitas, sulitnya melakukan invovasi produk, rendahnya mutu produk dan menurunnya motivasi tenaga kerja. Rendahnya teknologi yang dimiliki, padaumumnya disebabkan karena tidak adanya dana

untuk memiliki serta lemahnya informasi dan pemahaman yang dimiliki pengusaha akan teknologi yang berkembang dan tersedia di pasa saat ini.

Tabel 5.15
Alasan PKL tidak mendapatkan pembiayaan investasi
berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Kebutuhan Pembiayaan Investasi	Kategori		Pengelompokan jenis usaha		Total
			Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
Alasan, Jika tidak mendapatkan pembiayaan investasi	Sudah ada yang memodali	Ya	34.5	57.8	45
		Tidak	65.5	42.2	55
	Usaha sudah mapan	Ya	33.6	62.3	52
		Tidak	56.4	37.8	48
	Resiko perluasan usaha tinggi	Ya	43.6	57.8	50
		Tidak	56.4	42.2	50
	Kondisi ekonomi belum memungkinkan	Ya	51	57.8	59
		Tidak	40	42.2	41
	Permintaan tidak meningkat	Ya	40	51.1	45
		Tidak	60	48.9	55
	Jumlah		55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Dari hasil survey yang dilakukan terhadap 100 PKL di Pasar Raya Kota Solok dari 62% PKL yang tidak mendapatkan pembiayaan investasi, 69.1% diantaranya adalah PKL yang memiliki jenis usaha makanan. Pada umumnya 51% PKL yang memiliki jenis usaha makanan tidak mendapatkan pembiayaan investasi karena kondisi ekonomi yang belum memungkinkan untuk melakukan pinjaman. Diikuti 43.6% PKL mengatakan adanya resiko tinggi dalam perluasan usaha. 40 % PKL mengatakan tidak ingin pembiayaan investasi karena permintaan terhadap produk yang ditawarkan tidak meningkat. 34,5% PKL mengatakan karena sudah ada yang memberikan modal, dan 33,6% mengatakan karena usaha yang dijalannya sudah mapan sehingga tidak memerlukan pembiayaan investasi baik dari bank maupun non bank.

Sedangkan 53.3% PKL yang memiliki jenis usaha non makanan diantaranya 62.3% PKL mengatakan tidak memperoleh pembiayaan investasi karena usaha yang dijalani sudah mapan, 57.8% PKL mengatakan tidak memperoleh pembiayaan investasi karena sudah ada yang memberikan modal, takutnya dengan resiko tinggi yang diterima akibat perluasan usaha, kondisi ekonomi yang belum memungkinkan untuk melakukan pembiayaan investasi dan 51.1% PKL mengatakan tidak memperoleh pembiayaan investasi karena permintaan konsumen tidak dapat terpenuhi/ tidak meningkat..

Secara keseluruhan diketahui, bahwa umumnya (59%) PKL yang tidak memperoleh pembiayaan investasi baik dari bank maupun non bank disebabkan karena kondisi ekonomi belum memungkinkan untuk pembiayaan investasi.

Tabel 5.16
Rencana perluasan/ mengembangkan usaha
berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Kebutuhan Pembiayaan Investasi	Kategori	Pengelompokan jenis usaha		Total
		Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
		%	%	%
Ada rencana memperluas/ mengembangkan usaha	Ya	50.9	64.4	57
	Tidak	49.1	35.6	43
Jika ya, apakah anda membutuhkan pembiayaan investasi	Ya	50.9	64.4	57
	Tidak	49.1	35.6	43
Jumlah Pembiayaan investasi yang dibutuhkan	Tidak Membutuhkan Pembiayaan investasi	19.4	35.6	43
	< Rp. 10.000.000	14.5	8.9	12
	> Rp. 10.000.000	36.4	55.6	45
Jika anda memperoleh pembiayaan investasi tersebut, bagaimana prospek pengembalian kredit	Lancar	10.9	20	15
	Kurang lancar	1.8	0	1
	Macet	0	0	0
	Belum dapat diperkirakan	87.3	80	84
Jumlah		55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Perluasan atau pengembangan usaha merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pedagang/ pengusaha. Berdasarkan hasil survey terhadap 100 orang PKL yang ada di Paara Raya Kota Solok, 57% PKL memiliki rencana untuk memperluas dan mengembangkan usaha mereka. Diantaranya dari 55 PKL yang memiliki jenis usaha makanan, 50.9% diantaranya ingin memperluas dan mengembangkan usahanya. Dimana 36.4% PKL yang ingin memperluas dan mengembangkan usahanya membutuhkan pembiayaan investasi diatas Rp. 10.000.000 sedangkan PKL yang membutuhkan pembiayaan investasi di bawah Rp. 10.000.000 adalah sebanyak 14.5%.

Dan dari 45 PKL yang memiliki jenis usaha non makanan 64.4% diantaranya memiliki keinginan memperluas dan mengembangkan usaha yang sedang dijalannya. Dimana terdapat 55.6% membutuhkan pembiayaan investasi diatas Rp. 10.000.000 dan 8.9% membutuhkan pembiayaan investasi dibawah Rp. 10.000.000. Namun dengan demikian dari 100 orang PKL yang diteliti di Pasar Raya Kota Solok, sebagian besar (84%) PKL belum bisa memperkirakan apakah prospek pengembalian kredit dari perolehan pembiayaan investasi tersebut akan lancar atau tidak. Dan hanya 15% PKL yang mampu memperkirakan prospek pengembalian kredit yang diperoleh dari pembiayaan investasi akan lancar dengan alasan jaringan pemasaran yang dimiliki sudah luas (8%) dan 6% karena usaha yang dijalani memiliki potensi permintaan yang tinggi dari konsumen. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.17
Prospek pengembalian kredit berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Kebutuhan Pembiayaan Investasi	Kategori		Pengelompokan jenis usaha		Total
			Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
			%	%	
Alasan prospek pengembalian kredit lancar	Potensi permintaan Tinggi	Ya	5.5	6.7	6
		Tidak	5.5	13.3	9
	Jaringan pemasaran luas	Ya	5.5	11.1	8
		Tidak	5.5	8.9	7
	Perencanaan pengembangan usaha matang	Ya	0	2.2	1
		Tidak	10.9	17.8	14
Jumlah			55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Selain itu juga terdapat kendala – kendala bagi PKL yang menyebabkan kemacetan dalam pengembalian kredit. Hasil survey yang diperoleh dilapangan, kendala – kendala yang dihadapi PKL dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.18
Kendala yang menyebabkan kemacetan pengembalian kredit berdasarkan pengelompokan jenis usaha

Kebutuhan Pembiayaan Investasi	Kategori		Pengelompokan jenis usaha		Total
			Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
			%	%	%
Kendala utama yang menyebabkan kemacetan pengembalian kredit	Bencana alam		41.9	48.9	49
	Tidak sesuai dengan rencana semula		80	95.6	87
	Kurang pengawasan dari pihak bank		49.1	60	54
	Usaha macet		96.2	97.8	98
	Gangguan keamanan		60	60	60
Jumlah			55	45	100

Sumber : Data Lapangan Yang Diolah

Kurang lancarnya pengembalian kredit bagi sebagian PKL yang ada di Pasar kota Solok dapat disebabkan oleh kendala – kendala tertentu, sehingga

terjadi kredit macet atau belum dapat memperkirakan apakah kredit yang mereka pinjam dapat dikembalikan dengan lancar atau tidak. Beberapa kendala yang mereka hadapi adalah karena adanya bencana alam, tidak sesuai dengan rencana semula, kurang pengawasan dari pihak bank, usaha macet, dan gangguan keamanan. Dari semua kendala yang ada 96,2% PKL yang memiliki jenis usaha makanan dan 97,8% PKL yang memiliki jenis usaha non makanan mengatakan bahwa kendala yang paling sering mereka hadapi adalah karena usaha yang mereka jalani mengalami macet, yang mungkin dapat disebabkan karena perencanaan pengembangan usaha yang kurang matang sehingga terbentur pada masalah – masalah lainnya.

Kemudian 80% PKL yang memiliki jenis usaha makanan dan 95.6% PKL yang memiliki jenis usaha non makanan mengatakan bahwa kendala yang mereka hadapi adalah bahwa usaha yang mereka jalani tidak sesuai dengan rencana semula, seperti modal yang seharusnya digunakan sebagai modal usaha digunakan untuk kepentingan lain. Selain itu juga adanya kendala seperti gangguan keamanan, kurangnya pengawasan dan pihak Bank serta adanya bencana alam seperti gempa, banjir, longsor sehingga komunikasi antara daerah terputus.

5.1.4. Pajak dan Retribusi

Tabel 5.19
Pembayaran pajak oleh PKL berdasarkan
pengelompokan jenis usaha

Pajak dan Retribusi	Kategori	Pengelompokan jenis usaha		Total
		Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	Usaha Makanan
		%	%	%
Apakah anda membayar pajak ?	Ya	40	51.1	44
	Tidak	60	48.9	56
Jika ya, jenis pajak yang dibayarkan	Pajak penghasilan	1.8	2.2	2
	Pajak bumi dan bangunan	38.2	46.7	42
	Bea materai	0	1	1
	Tidak Membayar Pajak	60	48.9	55
Apakah anda setuju dengan pajak tersebut ?	Ya	40	51.1	45
	Tidak	60	48.9	55
Jumlah		55	45	100

Sumber : Data lapangan yang diolah

Sebagai Warga Negara Indonesia yang baik, setiap individu wajib membayar pajak. Dari hasil survey lapangan yang dilakukan terhadap 100 orang PKL yang ada di Pasar Raya Kota Solok hanya 44% PKL yang patuh membayar pajak. Diantaranya 40% PKL yang memiliki jenis usaha makanan dan 51,1% PKL yang memiliki jenis usaha non makanan, dimana sebagian besar jenis pajak yang dibayarkan adalah pajak bumi dan bangunan, karena sebagian besar PKL memiliki tempat usaha sendiri.

Namun untuk PKL yang membayar pajak penghasilan hanya sebagian kecil saja. Dari 55 orang PKL yang memiliki jenis usaha makanan hanya 1.8% saja yang membayar pajak penghasilan dan dari 45 orang PKL yang memiliki jenis usaha non makanan hanya 2.2% yang membayar pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar PKL di Pasar Raya Kota Solok masih belum

patuh membayar pajak atas penghasilan yang mereka terima ataupun jenis pajak lainnya.

Tabel 5.20
Pembayaran retribusi oleh PKL berdasarkan
pengelompokan jenis usaha

Pajak dan Retribusi	Kategori	Pengelompokan jenis usaha		Total
		Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	Usaha Makanan
		%	%	%
Apakah anda membayar retribusi	Ya	100	100	100
	Tidak	0	0	0
Jika ya, jenis retribusinya	Retribusi jasa umum	100	100	100
	Retribusi jasa usaha	0	0	0
	Retribusi perizinan tertentu	0	0	0
Biaya retribusi Jasa umum	< Rp. 2.000	38.2	8.9	25
	> Rp. 2.000	61.8	91.1	75
Biaya retribusi Jasa usaha	Tidak Ada	55	45	100
Biaya perizinan tertentu	Tidak Ada	55	45	100
Apakah anda setuju dengan retribusi tersebut	Ya	98.2	100	99
	Tidak	1.8	0	1
Jumlah		55	45	100

Sumber : Data lapangan yang diolah

Berbeda dengan pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil survei lapangan terhadap 100 orang PKL yang ada di Pasar Raya Kota Solok, seluruh PKL (100%) patuh membayar retribusi. Hal ini mungkin disebabkan karena biaya retribusi relatif rendah dibandingkan biaya pajak. Meskipun tetap membayar retribusi, namun 1% diantaranya tidak setuju dengan pemungutan retribusi tersebut. Pada umumnya jenis retribusi yang dibayarkan adalah biaya retribusi jasa umum. Sebagian besar (75%) PKL membayar biaya retribusi jasa umum diatas Rp. 2.000 per orang setiap bulannya dan 25% PKL membayar biaya retribusi jasa umum kurang dari Rp. 2.000 per orang setiap bulannya.

5.1.5. Pengelolaan Manajemen Keuangan

Tabel 5.2
Pengelolaan Manajemen Usaha oleh PKL berdasarkan
pengelompokan jenis usaha

Pengelolaan manajemen usaha	Kategori	Pengelompokkan jenis usaha		Total
		Usaha Makanan	Usaha Non Makanan	
		%	%	%
Apakah anda sudah mendapatkan pengetahuan manajemen	Ya	61.8	80	70
	Tidak	38.2	20	30
Pernahkah pemerintah memberikan pelatihan bantuan modal dan manajemen usaha kecil menengah guna mendapatkan keuntungan	Ya	23.6	20	22
	Tidak	76.4	80	78
Bagaimana pengelolaan laporan keuangan anda	Buku Harian	89.1	77.8	84
	Buku	10.9	22.2	16
	Bulanan			
Jumlah		55	45	100

Sumber : Hasil Penyebaran Kuesioner

Meskipun kelompok pedagang kaki lima merupakan sebagian dari kelompok usaha kecil yang merupakan kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan. Pedagang kaki lima sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerjayang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Untuk itu pengelolaan manajemen usaha perlu dilakukan oleh PKL di pasar Kota Solok.

Dari 55 orang PKL yang memiliki jenis usaha makanan di kota solok sebagian besar 61.8% PKL sudah mendapatkan pengetahuan manajemen, dan 23% diantaranya pernah mendapatkan pelatihan bantuan modal dan manajemen usaha menengah dari pemerintah guna mendapatkan keuntungan. Dalam

melaksanakan usahanya sebagian besar (89,1%) PKL ini mengelola laporan keuangan secara harian dengan mencatat pada buku harian.

Sedangkan dari 45 PKL yang memiliki jenis usaha non makanan, 80% sudah mendapatkan pengetahuan manajemen, 20% diantaranya pernah mendapatkan pelatihan bantuan modal dan manajemen usaha kecil menengah dari pemerintah untuk memperoleh keuntungan. Dan dalam melaksanakan usahanya sebagian besar (77,8%) PKL ini mengelola laporan keuangan secara harian dengan mencatat pada buku harian dan 22,2% mengelola laporan keuangan secara bulanan.

5.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat dijelaskan antara PKL yang memiliki jenis usaha makanan lebih banyak dibandingkan dengan PKL yang memiliki jenis usaha non makanan di pasar kota Solok Namun jumlahnya tidak terlalu jauh berbeda.

Rata – rata kondisi perkembangan omset PKL di kota Solok relatif stabil. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana dari 100 orang PKL yang ada di Kota Solok Hanya 19% PKL yang memiliki perkembangan omset yang menurun setiap tahunnya. Menurunnya perkembangan omset yang dialami oleh PKL dapat disebabkan oleh beberapa diantaranya karena permintaan kurang, jumlah pesaing semakin banyak, biaya tenaga kerja semakin tinggi dan biaya modal relatif tinggi, relatif rendahnya kualitas SDM dan harga jual produk yang semakin turun. Sementara untuk peningkatan omset 14 PKL lainnya disebabkan oleh beberapa

faktor, diantaranya kemampuan berkomunikasi yang efektif, adanya inovasi dan diversifikasi produk.

Dari 100 orang PKL yang ada di Koa solok, 52% memiliki tempat usaha sendiri dan 48% memiliki tempat usaha dengan mengontrak. Dan hanya sebagian (38%) yang memperoleh pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi dapat diperoleh melalui kredit bank, pegadaian, koperasi, BMT, rentenir ataupun dari teman maupun saudara. Di Kota Solok sebagian besar PKL mendapatkan pembiayaan investasi dari kredit perbankan (27%) dan koperasi (4). Namun masih ada juga mendapatkan pembiayaan investasi dari rentenir (6%), dengan alasan prosedur peminjaman lebih mudah, pelayanan yang cepat, bunga menarik dan adanya sistem bagi hasil serta jumlah angsuran kredit yang kecil. Pembiayaan investasi yang dibutuhkan adalah diatas Rp. 10.000.000. Sebagian besar pembiayaan investasi yang diperoleh PKL digunakan untuk membeli mesin – mesin dan menambah tenaga kerja. Selain itu juga digunakan untuk meningkatkan skala usaha, membuka cabang baru dan membeli bahan baku.

Umumnya, lebih dari separuh (56%) PKL yang ada di kota Solok tidak patuh membayar pajak, sedangkan 44% PKL lainnya patuh membayar pajak. Jenis pajak yang dibayarkan adalah pajak bumi dan bangunan. Namun dalam hal biaya retribusi, seluruh PKL patuh membayarnya. Sebagian besar (75%) PKL membayar retribusi jasa umum diatas Rp. 2.000. Sedangkan yang membayar retribusi jasa umum kurang dari Rp. 2.000 hanya sebanyak 25%.

Untuk mengembangkan potensi PKL dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan

keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki perlu dilakukan pengelolaan manajemen usaha. Sebagian besar PKL (70%) di kota Solok sudah mendapatkan pengetahuan manajemen serta pernah mendapatkan pelatihan bantuan modal dan manajemen usaha kecil menengah guna mendapatkan keuntungan. Pada umumnya (84%) pengelolaan laporan keuangan yang dilakukan oleh kelompok PKL masih secara harian yang dicatat dalam buku harian sedangkan yang melakukan secara bulanan hanya 16%.

Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM, peran pemerintah harus benar-benar tepat dan mampu membantu usaha yang sangat penting bagi penciptaan lapangan kerja ini pada saat diperlukan. Agar mampu memainkan peran dalam jangka menengah di atas, pemerintah harus berani mengubah paradigma pemberdayaan yang selama ini dipakai. Salah satunya adalah mengubah asumsi klise selama ini yang memandang koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang skalanya remeh, lemah, terbelakang dan pantas dikasihani. Program-program pemberdayaan hendaknya jangan seperti program *charity*, yang menganggap bahwa anggaran yang dikeluarkan semata-mata merupakan alokasi dana sosial tanpa upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kedewasaan berpikir para pelaku usaha tersebut. Untuk itu, program pemberdayaan hendaknya dirumuskan dengan terlebih dahulu memahami secara utuh perubahan lingkungan strategis dalam usaha koperasi dan UMKM.

Pemda provinsi mempunyai peran yang sangat penting terutama dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan berbagai dinas terkait yang berada di bawah kendalinya. Sedangkan pemda kabupaten/kota melakukan pembinaan langsung PKL di wilayahnya melalui unit-unit terkait. Dalam rangka mendorong usaha PKL dari Usaha Mikro/PKL menjadi usaha tetap/permanen, pemda harus berperan dalam mendata, menata, meregistrasi, dan membina PKL informal agar bisa mendapatkan status legal dan akhirnya menjadi sektor formal. Di dalam usaha memformalkan usaha PKL, pemda perlu mendorong agar PKL bisa mengelompokkan diri misalnya dalam bentuk paguyuban/asosiasi. Paguyuban ini biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan lokasi usaha. Paguyuban ini selanjutnya dapat didorong lebih lanjut untuk membentuk koperasi. Koperasi tersebut dapat berfungsi sebagai mediator/fasilitator bagi PKL untuk memenuhi kebutuhan PKL untuk meningkatkan kinerjanya. Aktivitas yang dapat dilakukan koperasi diantaranya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana usaha, bahan baku, pengolahan, pembiayaan, pemasaran, peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan sanitasi lingkungan. Akan tetapi perlu diperhatikan agar semua proses tersebut berjalan secara alami berdasarkan dorongan kepentingan bersama dan bukan dipaksakan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Pembinaan dan pemberdayaan PKL tersebut dapat berjalan baik dengan dukungan dari pemerintah pusat, yaitu dengan menerbitkan payung hukum sebagai landasan bagi pemda dalam legalisasi eksistensi dan pengembangan PKL berupa Peraturan pemerintah/menteri. Selain itu, melakukan fasilitasi dan perkuatan

dalam penataan, pembinaan, dan pengembangan PKL di daerah melalui wadah koperasi.

Di dalam usahanya membina, menata dan mengembangkan PKL beberapa dinas atau intitusi lain yang harus terlibat diantaranya adalah biro administrasi perekonomian, biro administrasi sarana dan prasarana kota, Bappeda/Bapeko, dinas perdagangan , dinas perindustrian, dinas pasar, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, dinas pendapatan daerah, Satpol PP, dinas tata kota, dinas kebersihan dan pertamanan, dinas pekerjaan umum, dinas perhubungan, dinas kesehatan, Balai POM, organisasi PKL (asosiasi PKL), koperasi PKL, lembaga bantuan modal/finansial, dan perguruan tinggi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil uraian pada bab sebelumnya, ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebagian besar jenis usaha pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok adalah usaha makanan yang dikelola oleh masyarakat solok terutama perempuan yang berumur diatas 36 tahun dan berpendidikan SLTA
2. Sebagian besar pedagang kaki Lima (PKL) yang ada di Pasar Raya Kota Solok memulai usahanya diatas tahun 1999 dengan omset perbulannya lebih dari Rp. 2.500.000
3. Rata – rata kondisi perkembangan omset PKL di Pasar Raya Kota Solok relatif stabil
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Raya Kota Solok meliputi permintaan berkurang, pesaing semakin banyak, biaya tenaga kerja semakin tinggi, biaya modal relatif tinggi, SDM berkualitas rendah, harga jual produk turun, komunikasi dan inovasi serta diversifikasi produk.
5. Masih adanya pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Solok yang memerlukan pembiayaan ssinvestasi yang diharapkan dari pemerintah atau instansi terkait. Pada saat ini pembiayaan investasi pedagang kaki lima yang diperoleh rata-rata dari investasi non bank terutama rentenir dengan alasan prosedurnya untuk memperoleh pinjaman kredit lebih mudah.

6. Sebagian besar PKL di Pasar Raya Kota Solok ingin memperluas atau mengembangkan usahanya. Dimana pedagang kaki lima memerlukan jumlah pembiayaan investasi diatas Rp. 10.000.000 yang akan digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada, membeli mesin sebagai alat bantu produksi, menambah kapasitas produksi sehingga dapat memajukan perekonomian PKL.
7. Sebagian besar PKL di Pasar Raya Kota Solok belum dapat memperkirakan bagaimana prospek pengembalian pinjaman kredit. Ini dikarenakan adanya kendala – kendala yaitu usaha yang mereka jalani macet setelah mendapatkan pinjaman, usaha yang mereka jalani tidak berjalan seperti semula, dan adanya gangguan keamanan seperti pungutan liar yang memberatkan bagi PKL, kurangnya pengawasan dari pihak bank, dan kurangnya pembinaan atau pengawasan dari instansi pemerintah terkait, ataupun karena adanya bencana alam.
8. Sebagian besar PKL di Pasar raya Kota Solok yang patuh membayar pajak hanya membayar pajak bumi dan bangunan sedangkan yang membayar penghasilan sangat sedikit sekali.
9. Respon seluruh PKL di Pasar Raya Kota Solok patuh membayar retribusi jenis jasa umum yang pada umumnya biaya yang dikeluarkan diatas Rp. 2.000 dan hanya sebagian kecil saja yang membayar retribusi dibawah Rp. 2.000
10. Dalam hal pengelolaan manajemen, sebagian besar PKL di Pasar Raya Kota Solok sudah mendapatkan pengetahuan manajemen, namun hanya sebagian

kecil yang pernah mendapatkan pelatihan bantuan modal dan manajemen guna mendapatkan keuntungan dari pemerintah

11. Dalam pengelolaan laporan keuangan, sebagian besar PKL di Pasar Raya Kota Solok membuat laporan keuangan secara harian dalam buku harian.

6.2 Saran

1. Pemerintah Kota Solok harus membuat mekanisme yang jelas dan harus di evaluasi apakah bantuan itu tepat sasaran atau tidak.
2. Dilakukan pengelolaan yang baik oleh Bidang Pengelolaan Pasar terhadap retribusi daerah dari PKL sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dilakukan penempatan atau penataan lokasi PKL yang teratur dan rapi.
4. Perlu dikaji kembali tugas dan wewenang dari Bidang Pengelolaan Pasar Kota Solok.
5. Perlu adanya program pembinaan dalam menumbuhkan kembangkan semangat wirausaha dan program pelatihan dan bimbingan terpadu untuk setiap pelaku PKL terutama berkaitan dengan cara-cara mengelola usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausy, C. M. (1995). Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima di Perkotaan. Jakarta, Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI.
- Friedman (1992) Tentang Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. Jakarta
- Handayani, Suci. (akan datang). "Memahami Pelaku Sektor Informal Perkotaan. Penataan Pedagang Tanpa Kekerasan." Jurnal Analisis Sosial Akatiga.
- Hugo, Graeme J. (1991). "Partisipasi Kaum Migran dalam Ekonomi Kota di Jawa Barat." Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- ILO. (2007). Labour and Social Trends in Asean 2007: Integration, Challenges and Opportunities. Bangkok: ILO.
- Kusakabe, Kyoko. (2006). Policy Issues on Street Vending: An Overview of Studies in Thailand, Cambodia, and Mongolia. Bangkok, ILO.
- Manning, Chris and Tadjuddin Noer Effendi. (1991). Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- Moser, Caroline N. (1979). "Informal Sector or Petty Commodity Production: Dualism or Dependence in Urban Development?" The Urban Informal Sector: Critical Perspectives on Employment and Housing Policies. R. Bromley. Oxford, Pergamon Press: 1041-1064.
- Pena, S. (1999). "Informal Markets: Street Vendors in Mexico City." Habitat International 23 (3): 363-372. Priyono, Edy. (2002). "Mengapa Angka Pengangguran Rendah di Masa Krisis: Menguak Peranan Sektor Informal sebagai Buffer Perekonomian." Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan 1 (2).
- Prijono dan pranaka (1996) Pemberdayaan : konsep, kebijakan, dan implementasi/ Onny S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, penyunting Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1996.

- Rachbini, Didik J. dan Abdul Hamid. (1994). *Ekonomi Informal Perkotaan: Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta, LP3ES. Sj-Sumarto, Hetifah. (akan datang). "Kebijakan Ramah PKL di Perkotaan: Belajar dari Kota Solo." *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*.
- Rachbini, Didik J. & Hamid, Abdul, 1994, *Ekonomi informal perkotaan : gejala involusi gelombang kedua* / Didik J. Rachbini, Abdul Hamid LP3ES, Jakarta
- Riyanto (1995) *Hubungan Antara Efektivitas Hukum dengan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di DKI dan Bappenas bekerjasama dengan PEP-LIPI Tahun terbit: 1995*
- Skinner, Caroline. (2008). "The Struggle for the Streets: Processes of Exclusion and Inclusion of Street Traders in Durban, South Africa."
- Swasono (1987) *Konsep Sektor Informal*" Dalam Chris Manning dan Tajuddin Noor Effendi (Ed), *Urbanisasi, Pengangguran, dan sector Informal di Jakarta.*, Gramedia. Jakarta.
- Sumodiningrat (1999) *Agenda pemulihan ekonomi: mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan otonomi daerah* Gunawan Sumodiningrat Kota Jakarta Penerbit, 1999
- Todaro, Michael P. dan Jerry Stilkind. (1991). "Dilema Urbanisasi." *Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia: 4-33.
- Widyaningrum, Nurul. (akan datang). "Kota dan Pedagang Kaki Lima." *Jurnal Analisis Sosial Akatiga*.

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Saudara/i

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (TA) jurusan ilmu ekonomi Universitas Andalas Padang, saya:

Nama : Rahma Yenita

BP : 06951009

Memohon kesediaan Bapak / Ibu / Sdr / i. meluangkan sedikit waktu untuk mengisi kuesioner ini. Tujuan pembuatan kuesioner ini adalah untuk memenuhi data dan informasi penulisan Tugas Akhir saya.

Informasi dan data yang Bapak / Ibu / Sdr / i berikan. Akan saya jamin kerahasiannya dan hanya di gunakan untuk penulisan Tugas Akhir saya.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Rahma Yenita

PENELITIAN
ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA SEKTOR INFORMAL
(Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Solok)

Survei Pengusaha

Rahasia

No. Kuisisioner : _____
Pewawancara : _____

--	--	--

INFORMASI UMUM RESPONDEN

1 Nama : _____

2 Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan ☐

3 Umur :

4 Status Perkawinan : 1. Kawin 2. Belum kawin
3. Cerai hidup 4. Cerai mati

5 Pendidikan : 1. Tdk tamat SD 4. SLTA 6. Sarjana
2. SD 5. Akademi 7. Pasca Sarjana
3. SLTP

6 Tahun mulai usaha : _____

Jenis Usaha Utama : _____

7 Cakupan Pemasaran : 1 Kabupaten/Kota 3 Antar Provinsi
2 Provinsi 4 Nasional
5 Luar Negeri ☐

Omset/bulan : Rp.....

Indikator: untuk setiap pertanyaan dengan tanda () urutkan lima jawaban terpenting dimulai dengan angka 1 untuk jawaban yang paling penting*

KONDISI USAHA

Bagaimana perkembangan omset usaha anda setahun terakhir?
1 Menurun 2 Stabil 3 Meningkatkan ☐

Jika menurun, apa penyebabnya?*

	ya	tidak
Permintaan berkurang	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pesaing semakin banyak	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Biaya tenaga kerja semakin tinggi	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Biaya modal relatif tinggi	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SDM berkualitas rendah
 Pajak dan pungutan tinggi
 Biaya tidak resmi banyak
 Perekonomian membaik
 Transportasi semakin sulit
 Harga jual produk turun
 Lainnya sebutkan _____

1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2

3 Jika meningkat, apa faktor pendorongnya?

Perekonomian membaik
 Persaingan berkurang
 Transportasi semakin lancar
 Komunikasi semakin lancar
 Harga jual produk naik
 Kebijakan pemerintah yang mendukung
 Inovasi dan diversifikasi produk
 Lainnya sebutkan _____

ya	tidak
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2

Jika ya, sebutkan _____

KEBUTUHAN PEMBIAYAAN INVESTASI

Jenis kepemilikan tempat usaha anda?

1 kontrakan 2 punya sendiri

--

2 Apakah anda sedang mendapatkan pembiayaan investasi?

1. Ya 2. Tidak =>P5

--

Jika ya, bagaimana anda mendapatkannya?

1 Kredit perbankan
 2 Pegadaian
 3 Koperasi
 4 BMT
 5 Rentenir
 6 Teman/sdr
 7 Lainnya sebutkan _____

Ya	Tidak
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2

Jika anda mendapatkan pembiayaan investasi dari non bank, apa alasannya?*

☐ Prosedur mudah
☐ Bunga menarik

☐ Kredit berjumlah kecil
☐ Tidak perlu agunan

☐ Pelayanan mudah
☐ Sistem bagi hasil

Untuk apa pembiayaan tersebut yang utama anda gunakan?*

☐ Meningkatkan skala usaha
☐ Buka cabang di tempat lain
☐ Membeli bahan baku
☐ Membeli Mesin-mesin
☐ Menambah tenaga kerja
☐ Lainnya sebutkan: _____

6 Jika anda tidak sedang mendapatkan pembiayaan, mengapa?

- Sudah ada yang memodali
- Usaha sudah mapan
- Resiko perluasan usaha tinggi
- Kondisi ekonomi belum memungkinkan
- Pemintaan tidak meningkat
- Lainnya sebutkan: _____

ya	tidak
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

7 Apakah anda berencana memperluas/mengembangkan usaha?

- 1 ya 2 tidak (stop)

☐

8 Jika ya, apakah anda membutuhkan pembiayaan investasi?

- 1 ya 2 tidak

☐

9 Jika anda membutuhkan, berapa kira-kira jumlahnya? Rp. _____

10 Sebutkan rencana penggunaannya?*

- ☐ Meningkatkan skala usaha
- ☐ Buka cabang di tempat lain
- ☐ Membeli bahan baku
- ☐ Membeli Mesin-mesin
- ☐ Menambah tenaga kerja
- ☐ Lainnya sebutkan: _____

11 Apa dampak yang diharapkan dari pembiayaan tersebut?*

- ☐ Proses produksi lancar
- ☐ Meningkatkan skala usaha
- ☐ Meningkatkan omset penjualan
- ☐ Buka cabang di tempat lain
- ☐ Lainnya sebutkan: _____

12 Apakah anda sudah mempunyai sumber pembiayaan tersebut?

- 1 sudah 2 belum

☐

13 Jika sudah, dari mana anda akan mendapatkan?

- 1 Kredit perbankan
- 2 Pegadaian
- 3 Koperasi
- 4 BMT
- 5 Rentenir
- 6 Teman/sdr
- 7 Lainnya sebutkan _____

ya	tidak
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

☐

14 Jika anda berencana mendapatkan pembiayaan investasi bukan dari bank, mengapa?*

- ☐ Prosedur mudah
- ☐ Bunga menarik

- ☐ Kredit berjumlah kecil
- ☐ Tidak perlu agunan

- ☐ Pelayanan mudah
- ☐ Sistem bagi hasil

16 Bagaimana prospek pengembalian kredit, jika anda benar-benar memperoleh pembiayaan tersebut?

1 Lancar

2 Kurang lancar

3 Macet

4 Belum dapat diperkirakan

☐

17 Jika prospeknya lancar, apa alasannya?

1 Potensi permintaan tinggi

2 Jaringan pemasaran luas

3 Perencanaan pengembangan usaha matang

4 Lainnya sebutkan _____

ya

tidak

1
1
1
1

2
2
2
2

18 Apa kendala utama yang mungkin menyebabkan kemacetan pengembalian kredit?*

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Bencana alam

Tidak sesuai dengan rencana semula

Kurang pengawasan dari pihak bank

Usaha macet

Gangguan keamanan

Lainnya, sebutkan _____

PAJAK DAN RETRIBUSI

1 Apakah anda membayar pajak?

1 ya

2 tidak

☐

2 Jika ya, jenis pajaknya?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Pajak penghasilan

Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah

Pajak bumi dan bangunan

Bea materai

Bea perolehan hak tanah dan bangunan

3 Apakah anda setuju dengan pajak tersebut?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ya, Alasannya _____

Tidak, Alasannya _____

4 Apakah anda membayar retribusi?

1 ya

2 tidak

☐

5 Jika ya, jenis retribusinya?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Retribusi jasa umum

Retribusi jasa usaha

Retribusi perizinan tertentu

Apakah anda setuju dengan retribusi tersebut?

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Ya, Alasannya _____

Tidak, Alasannya _____

PENGELOLAAN MANAJEMEN USAHA

Apakah anda sudah mendapatkan pengetahuan manajemen?

1 ya

2 tidak

☐

- 2 Pernahkah pemerintah daerah memberikan pelatihan,
1 ya 2 tidak
- 3 Bantuan modal dan dan manajemen usaha kecil menengah
guna mendapatkan keuntungan?
1 ya 2 tidak
- 4 Bagaimana pengelolaan laporan keuangan anda?
1 buku harian 2 buku bulanan

☐☐☐